

**BEKERJA BERSAMA  
MERANGKUL SEMUA**



**Meratus  
Geopark**



**Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan  
Nomor 031 Tahun 2025 tentang  
Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2025-2029  
Tanggal 12 September 2025  
Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2025 Nomor 31**

# **Rencana Strategis**

## **Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029**

**SEKRETARIAT DAERAH**

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya telah disusun Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan RENSTRA SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan serta sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan (Tahun 2025-2029) begitu juga dengan indikator pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun anggaran.

Akhirnya Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan atas bantuan dan partisipasi semua pihak, dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Banjarbaru,     Maret 2025

Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan,



*Muhammad Syarifuddin*  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19671030 199412 1 003

## DAFTAR ISI

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                 | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                     | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                              | vi  |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....                                                                      | 1   |
| BAB II .....                                                                                         | 7   |
| <b>2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b> .....                                                 | 7   |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                          | 54  |
| <b>3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan<br/>Tahun 2025-2029</b> .....   | 59  |
| <b>3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan<br/>Tahun 2025-2029</b> .....  | 60  |
| <b>3.3 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan<br/>Tahun 2025-2029</b> ..... | 66  |
| <b>3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan<br/>Selatan 2025-2029</b> ..... | 68  |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....            | 73  |
| <b>4.1 Uraian Program</b> .....                                                                      | 73  |
| <b>4.2 Uraian Kegiatan</b> .....                                                                     | 74  |
| <b>4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu<br/>indikatif</b> .....       | 120 |
| <b>4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas<br/>pembangunan daerah</b> .....  | 145 |

|                            |                                                                                                                                                                             |            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.5</b>                 | <b>Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .....</b> | <b>148</b> |
| <b>4.6</b>                 | <b>Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....</b>                                                | <b>150</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b> |                                                                                                                                                                             | <b>151</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....                                                                                     | 54  |
| Tabel 2.2 Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....                                          | 56  |
| Tabel 2.1.4 Jenis-jenis Kerja sama Daerah .....                                                                                      | 44  |
| Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah .....                                                                                   | 34  |
| Tabel 2.7 Realisasi Keuangan Belanja dana APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .....       | 38  |
| Tabel 2.8 Realisasi Keuangan Belanja APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 ..... | 39  |
| Tabel 2.10 Permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi .....                          | 45  |
| Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran PD .....                                                                                                | 62  |
| Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD .....                                                                                                | 67  |
| Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD .....                                                                                            | 71  |
| Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD .....                                                           | 77  |
| Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....                                                                    | 120 |
| Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....                                     | 145 |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD .....                                                                                           | 148 |
| Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD .....                                                                                           | 150 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....                 | 2  |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan .....   | 8  |
| Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ..... | 11 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah dan RPJP Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu, sesuai dengan diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II, wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis (RENSTRA) memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029).

#### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan;
3. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah; Permendagri 50/2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama,

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk memberikan arah dan acuan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sejalan dengan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) dimaksud.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.2 Landasan Hukum**

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029**

#### **3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Uraian Program**

**4.2 Uraian Kegiatan**

**4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif**

**4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas  
pembangunan daerah**

**4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-  
2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

**4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun  
2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

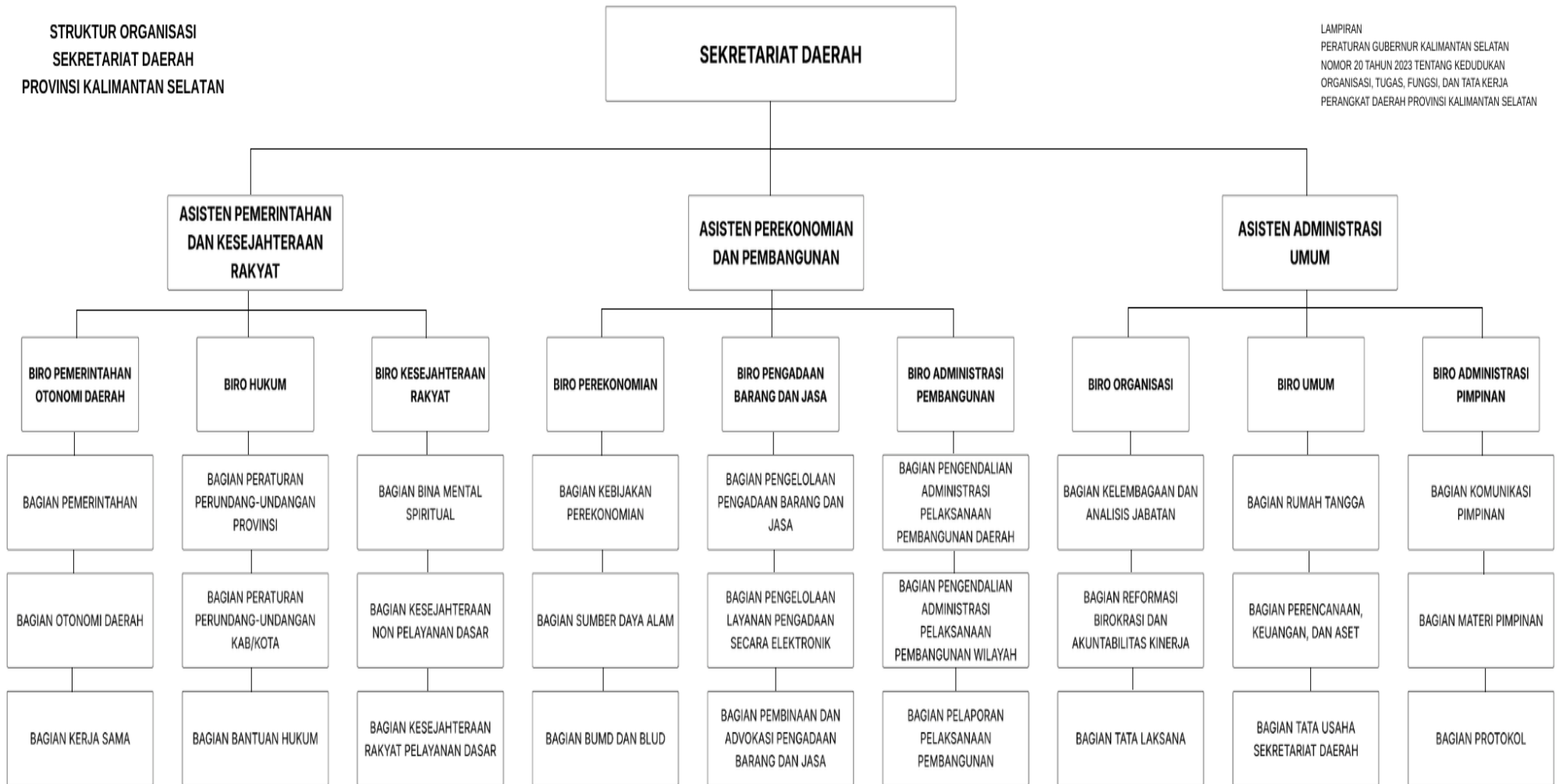
#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Pergub SOTK**

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian tugas Sekretariat Daerah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 20 Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

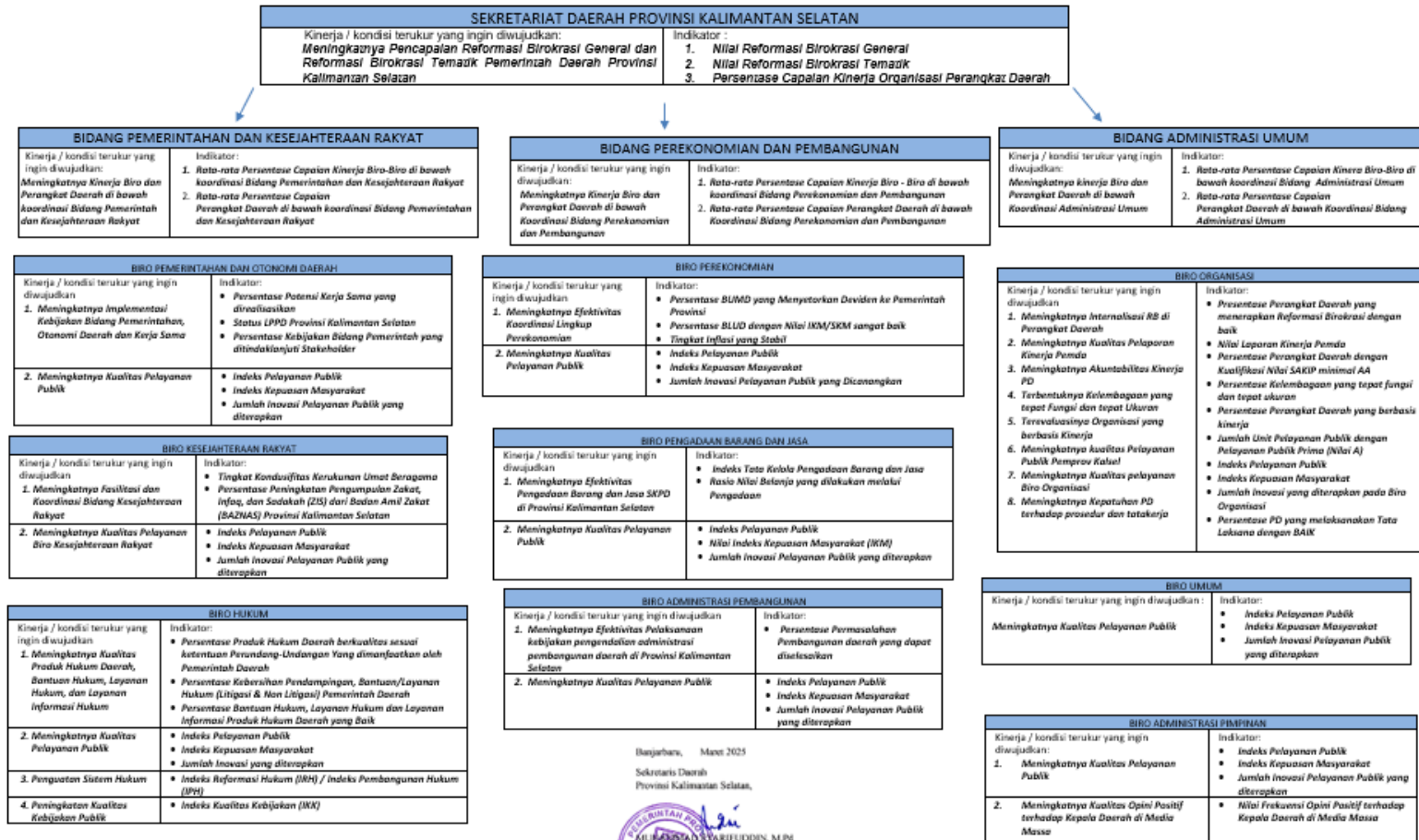
1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
5. Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Fasilitasi Administrasi Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Pengelolaan Administrasi Umum, Organisasi serta Administrasi Pimpinan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Administrasi;
4. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi Administrasi Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Administrasi Umum, Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Organisasi;
6. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah;
7. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan Administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi daerah; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, dibantu oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten tersebut terdiri dari:

#### **2.1.1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan hukum; pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Hukum;
2. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum;
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Hukum;
5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

**a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama. Uraian tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi administrasi Pemerintahan;
3. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi administratif penyelenggaraan otonomi daerah;
4. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi administratif pengembangan dan pelaksanaan kerja sama;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
8. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Unsur-unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah :

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Otonomi Daerah; dan
3. Bagian Kerja Sama.

#### **b. Biro Hukum**

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2003 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 12), mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Bidang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kotan, dan Bidang Bantuan Hukum. Uraian tugas Biro Hukum adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas Peraturan Perundang-undangan Provinsi;

2. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
3. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas Bantuan Hukum;
4. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembahasan dan perumusan rancangan produk hukum Daerah serta melakukan kajian hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dan kajian penyusunan produk hukum daerah di Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Unsur-unsur Biro Hukum adalah:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
2. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan

### 3. Bagian Bantuan Hukum

#### c. **Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar. Uraian tugas Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum pembinaan Kesejahteraan Rakyat;
2. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi Sarana dan Prasarana Spiritual;
3. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual;
4. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif peningkatan mutu pendidikan;
5. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
6. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman;
7. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif kesehatan masyarakat dan sosial;
8. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pengembangan Kebudayaan;

9. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif pengelolaan Kepariwisata Daerah;
10. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pengembangan Pemuda;
11. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pembudayaan Olahraga;
12. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
13. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
15. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
16. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Statistik dan Persandian; dan
17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;

2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Unsur-unsur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

1. Bagian Bina Mental Spiritual;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

#### **2.1.1.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan;
3. Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan;
3. Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

**a. Biro Perekonomian**

Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, BUMD dan BLUD daerah. Biro Perekonomian mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum pembinaan Perekonomian;
2. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Penyelenggaraan urusan Analisis Ekonomi Makro;
3. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Analisis Ekonomi Mikro;
4. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan Tata Usaha Biro;
5. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
6. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif pengembangan BUMD dan BLUD;
7. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
8. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Energi dan Air; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Perekonomian mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Umum Pembinaan Perekonomian;
2. Perumusan Kebijakan Administratif, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pembinaan Administratif Kebijakan Perekonomian;
3. Perumusan Kebijakan Administratif, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pembinaan Administratif Sumber Daya Alam; dan
4. Perumusan Kebijakan Administratif, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pembinaan Administratif BUMD dan BLUD.

Unsur-unsur Organisasi Biro Perekonomian Daerah adalah:

1. Bagian Kebijakan Perekonomian;
2. Bagian Sumber Daya Alam; dan
3. Bagian BUMD dan BLUD.

#### **b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi serta Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Melaksanakan Pengoordinasian, Penyusunan Program dan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

3. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan Kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Unsur-unsur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

**c. Biro Administrasi Pembangunan**

Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Administrasi Pembangunan;
2. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD;
3. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN;
4. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
5. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
6. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan

Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

7. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah analisis capaian kinerja pembangunan daerah;
8. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
9. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah kebijakan pembangunan daerah; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Unsur-unsur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan adalah:

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

#### **2.1.1.3 Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Organisasi, Umum, dan Administrasi Pimpinan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Administrasi Umum;
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi rumah tangga pimpinan, perencanaan, keuangan, dan aset Sekretariat Daerah serta persuratan dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan materi pimpinan;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Keuangan, Komunikasi dan Informasi, pengembangan dan pelatihan Sumber

Daya Manusia serta penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta;  
dan

5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Organisasi;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
3. Pengoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Organisasi;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Organisasi;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Instansi Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Organisasi, Umum, dan Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi:

**a. Biro Organisasi**

Biro Organisasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penataan kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota;
3. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
4. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi;

5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah;
7. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Organisasi terdiri atas:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
3. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.

#### **b. Biro Umum**

Biro Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Perencanaan Keuangan dan Aset, dan Tata Usaha Sekretariat Daerah. Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Perencanaan Keuangan dan Aset, dan Tata Usaha Sekretariat Daerah
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Perencanaan Keuangan dan Aset, Tata Usaha Sekretariat Daerah; dan

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perencanaan dan keuangan;
2. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
3. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan dan fasilitasi administratif fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan dan fasilitasi administratif fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penghubung pemerintah provinsi di Jakarta; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah

**c. Biro Administrasi Pimpinan**

Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol. Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol;
2. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol;
2. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Bagian Komunikasi Pimpinan;
2. Bagian Materi Pimpinan; dan
3. Bagian Protokol.

#### **2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 sebanyak 268 orang dengan klasifikasi sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kelamin

| NO           | URAIAN    | JUMLAH ORANG |
|--------------|-----------|--------------|
| 1.           | Laki-laki | 178          |
| 2.           | Perempuan | 90           |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>268</b>   |

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Golongan / Kepangkatan

| NO           | URAIAN       | JUMLAH ORANG |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.           | Golongan I   | 1            |
| 2.           | Golongan II  | 20           |
| 3.           | Golongan III | 184          |
| 4.           | Golongan IV  | 63           |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>268</b>   |

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan formal

| NO | URAIAN    | JUMLAH ORANG |
|----|-----------|--------------|
| 1. | SD        | 1            |
| 2. | SLTP      | 4            |
| 3. | SLTA      | 34           |
| 4. | DIPLOMA I | 23           |

|              |              |            |
|--------------|--------------|------------|
| 5.           | DIPLOMA II   | 1          |
| 6.           | DIPLOMA III  | 10         |
| 7.           | DIPLOMA IV   | 22         |
| 8.           | SARJANA (S1) | 100        |
| 9.           | MASTER (S2)  | 71         |
| 10.          | DOKTOR (S3)  | 2          |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>268</b> |

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat penjenjangan

| <b>NO</b>    | <b>URAIAN</b>                          | <b>JUMLAH ORANG</b> |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1.           | SPADYA/ADUM/SEPADA/ADUMLA/DIKLATPIM IV | 24                  |
| 2.           | SPADAYA/SPAMA/DIKLATPIM III            | 6                   |
| 3.           | SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM II              | 1                   |
| 4.           | LEMHANAS/SPATI/DIKLATPIM I             | 0                   |
| 5.           | NON DIKLAT                             | 237                 |
| <b>TOTAL</b> |                                        | <b>268</b>          |

Pengembangan Aset yang dikelola oleh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah

| <b>No</b> | <b>NAMA KIB</b> | <b>JENIS ASET</b> | <b>JUMLAH ASET</b> |            | <b>KUALITAS</b> |              |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|
|           |                 |                   | <b>N-2</b>         | <b>N-1</b> | <b>BAIK</b>     | <b>BURUK</b> |
| 1.        | KIB A           | Tanah             | 77 persil          | 72 persil  | -               | -            |

|    |       |                             |             |             |               |          |
|----|-------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 2. | KIB B | Peralatan dan Mesin         | 11.364 buah | 12.319 buah | 12.300 0 Baik | 19 Rusak |
| 3. | KIB C | Gedung dan Bangunan         | 156 buah    | 156 buah    | 149 Baik      | 7 Rusak  |
| 4. | KIB D | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 23 buah     | 23 buah     | 18 Baik       | 5 Rusak  |
| 5. | KIB E | Aset Tetap Lainnya          | 13 buah     | 13 buah     | 13 Baik       | -        |
| 6. | KIB F | Konstruksi Dalam Pengerjaan | -           | -           | -             | -        |

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM)

Pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Pencapaian dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara yang direncanakan atau diharapkan dengan realisasinya, atau antara *Performance Plan (Rencana Kinerja)* yang diinginkan dengan *Performance Result (Realisasi Kinerja)* yang dicapai Biro-Biro kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya *Performance Gap (Celah Kinerja)* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Selama jangka waktu RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja selama 2021-2024 di mana rata-rata menunjukkan angka yang menggembirakan, yang berarti bahwa antara target dan realisasi dapat terealisasi. Hal itu dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

| Indikator Kinerja                                                        | Kondisi Tahun Awal |             |                |             |                | Target Capaian |                |             |                |             |                | Kondisi Akhir Periode (2025) | BIRO       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|------------|
|                                                                          |                    | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023    | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 |                              |            |
| Persentase Terbinanya Lembaga FKUB                                       | 100                | 100         | 100            | 100         | 100            | 100            | 100            | 100         | 100            | 100         | 100            | 100                          | Kesra      |
| Persentase Kelembagaan keagamaan terlibat pada hari-hari besar keagamaan | 40                 | 50          | 50             | 60          | 60             | 70             | 70             | 80          | 80             | 90          | 100            | 100                          | Kesra      |
| Presentase Sarana keagamaan yang dibina                                  | 5                  | 10          | 10             | 15          | 15             | 20             | 20             | 25          | 30             | 30          | 30             | 35                           | Kesra      |
| Indeks Kepuasan Masyarakat                                               | 75,38              | 76          | 76             | 78,13       | 80,37          | 79,5           | 80,10          | 80,88       | 81,01          | 82,25       | 84,31          | 83,63                        | Organisasi |
| Kinerja Pemerintahan (Angka)                                             | BB                 | BB          | BB             | BB          | BB             | A              | A              | A           | A              | A           | BB             | A                            | Organisasi |
|                                                                          | 76,3               | 78,52       | 76,69          | 78,66       | 77,29          | 80,26          | 80,15          | 80,55       | 80,74          | 80,56       | 78,49          | 81,01                        | Semua Biro |
| Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran                           | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%                         | Semua Biro |
| Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Pemda                            | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%                         | Semua Biro |
| Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan  | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%                         | Semua Biro |
| Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur                             | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%                         | Semua Biro |

| Indikator Kinerja                                                                                                  | Kondisi Tahun Awal |             |                |             |                | Target Capaian |                |             |                |             |                | Kondisi Akhir Periode (2025) | BIRO                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                    | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023    | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 |                              |                                                               |
| Meingkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur                                                              | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%                         | Semua Biro                                                    |
| Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur                                                                             | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%                         | Semua Biro                                                    |
| Tersedianya Informasi Formasi dengan Persyaratan Kompetensi Jabatan                                                | 100                | 100         | ?              | 100         | ?              | 100            | ?              | 100         | ?              | 100         | ?              | 100                          | Organisasi                                                    |
| Tingkat kepuasan layanan kehumasan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan                               | 79,28              | 80          | 81,58          | -           | -              | -              | -              | -           | -              | -           | -              | -                            | Hubungan Masyarakat dan Protokol / Biro Administrasi Pimpinan |
| Tingkat kepuasan layanan materi Pimpinan dan komunikasi Pimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | -                  | -           | -              | 69,12       | 78,01          | -              | -              | -           | -              | -           | -              | -                            | Biro Administrasi Pimpinan                                    |
| Tingkat kepuasan layanan keprotokolan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan                            | 79,14              | 80          | 81,97          | 81          | 84,79          | -              | -              | -           | -              | -           | -              | -                            | Hubungan Masyarakat dan Protokol / Biro Administrasi Pimpinan |

| Indikator Kinerja                                                                                                                    | Kondisi Tahun Awal |             |                |             |                | Target Capaian |                |             |                |             |                | Kondisi Akhir Periode (2025) | BIRO                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                      |                    | Target 2021 | Realisasi 2021 | Target 2022 | Realisasi 2022 | Target 2023    | Realisasi 2023 | Target 2024 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 |                              |                            |
| Nilai survey kepuasan layanan administrasi pimpinan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/Indeks Kepuasan Masyarakat | -                  | -           | -              | -           | -              | 75             | 77,19          | 90          | 90,71          | 95          | -              | -                            | Biro Administrasi Pimpinan |
| Presentase/nilai frekuensi opini positif terhadap Kepala Daerah di media massa                                                       | 47,66              | 80%         | 18,5%          | 81%         | 80%            | 81%            | 81%            | 82%         | 82,43%         | 83%         | -              | -                            | Biro Administrasi Pimpinan |
| Prosentase BUMD yang Sehat                                                                                                           | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           |             |                |                              | Ekonomi                    |
| Prosentase BLUD yang Baik                                                                                                            | 100%               | 100%        | 100%           | 100%        | 100%           | 100%           | 100%           | 100%        | 100%           |             |                |                              | Ekonomi                    |
| Tingkat Inflasi yang Stabil                                                                                                          | -                  | 0 - ≤ 3%    | 0,58%          | 0 - ≤ 3%    | 6,99%          | 3 ± 1 %        | 2,43%          | 3 ± 1 %     | 1,95%          |             |                |                              | Ekonomi                    |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                                               | -                  | N/A         | N/A            | 100%        | 100%           | 3,5 Poin       | 3,57 Poin      | 3,5 Poin    | 3,8 Poin       |             |                |                              | Semua Biro                 |
| Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan                                                                                     | -                  | N/A         | N/A            | 1 Buah      | 1 Buah         | 1 Buah         | 1 Buah         | 1 Buah      | 1 Buah         |             |                |                              | Semua Biro                 |
| Persentase Produk Hukum Daerah Berkualitas Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Daerah (Pemda)      | -                  | 100         | 100            | 100         | 100            | 100            | 100            | 100         | 100            | 100         | -              | -                            | Hukum                      |

| Indikator Kinerja                                                                                              | Kondisi Tahun Awal |                    |                    |                    |                    | Target Capaian     |                    |                    |                    |                    |                    | Kondisi Akhir Periode (2025) | BIRO  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------|
|                                                                                                                |                    | Target 2021        | Realisasi 2021     | Target 2022        | Realisasi 2022     | Target 2023        | Realisasi 2023     | Target 2024        | Realisasi 2024     | Target 2025        | Realisasi 2025     |                              |       |
| Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintah Daerah (Pemda) | -                  | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | -                  | -                            | Hukum |
| Persentase Bantuan/Layanan Hukum, Dan Layanan Informasi Produk Hukum Yang Baik                                 | --                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                            | Hukum |
| Presentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan RANHAM                                                      | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota) | 100% (13 Kab/Kota)           | Hukum |
| Pelayanan Administrasi Rumah Tangga daerah                                                                     | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik               | Baik                         | Umum  |

Tabel 2.7 Realisasi Keuangan Belanja dana APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

| No            | Unit Kerja                           | 2022                   |                        |             | 2023                   |                        |              | 2024                   |                        |              |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
|               |                                      | Pagu dana              | Penyerapan             | %           | Pagu dana              | Penyerapan             | %            | Pagu dana              | Penyerapan             | %            |
| 1             | Sekretariat Daerah (Dana Rutin)      | 128.733.829.411        | 120.140.244.042        | 93,32       | 184.037.760.900        | 163.737.925.567        | 88,97        | 205.155.660.147        | 160.655.805.377        | 78,31        |
| 2             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 2.299.030.430          | 2.020.325.210          | 87,88       | 4.102.064.950          | 3.651.758.669          | 89,02        | 5.541.686.100          | 4.828.537.658          | 87,13        |
| 3             | Biro Hukum                           | 4.794.585.500          | 3.844.935.006          | 80,19       | 4.867.001.800          | 4.194.180.706          | 86,17        | 7.471.247.900          | 5.455.079.647          | 73,01        |
| 4             | Biro Organisasi                      | 3.392.627.500          | 3.182.268.329          | 93,80       | 4.527.558.100          | 4.301.859.760          | 95,02        | 7.378.114.600          | 6.767.252.297          | 91,72        |
| 5             | Biro Administrasi Pembangunan        | 2.688.755.500          | 2.564.983.908          | 80,70       | 4.436.934.400          | 4.275.209.695          | 96,36        | 8.174.209.300          | 6.627.182.547          | 81,07        |
| 6             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | 134.709.893.700        | 122.537.167.048        | 90,96       | 93.150.796.600         | 88.849.422.188         | 95,38        | 149.992.926.000        | 131.588.901.984        | 87,73        |
| 7             | Biro Administrasi Pimpinan           | 13.490.224.900         | 13.029.614.912         | 96,59       | 15.225.458.100         | 14.677.813.385         | 96,4         | 27.025.310.804         | 21.196.345.753         | 78,43        |
| 8             | Biro Umum                            | 27.134.704.300         | 24.078.151.547         | 88,74       | 66.726.296.600         | 57.390.260.373         | 89,69        | 66.696.842.900         | 51.512.306.186         | 77,23        |
| 9             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | 4.483.467.500          | 3.941.239.796          | 87,91       | 5.116.520.619          | 4.575.995.146          | 89,44        | 8.262.196.700          | 7.046.643.959          | 85,29        |
| 10            | Biro Perekonomian                    | 2.235.996.400          | 1.987.921.980          | 88,91       | 3.632.337.700          | 3.257.770.031          | 86,01        | 8.205.564.700          | 4.593.754.897          | 55,98        |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>323,963,115,141</b> | <b>297,326,851,778</b> | <b>88,9</b> | <b>385,822,729,769</b> | <b>348,912,195,520</b> | <b>91,25</b> | <b>493.903.759.151</b> | <b>400.271.810.305</b> | <b>79,59</b> |

Tabel 2.7 menyajikan realisasi keuangan belanja APBD kegiatan langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Terlihat bahwa pagu dana dan realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total realisasi penyerapan anggaran mencapai lebih dari 93% dari pagu yang tersedia. Tahun 2023, tingkat penyerapan sedikit menurun menjadi sekitar 89%, sedangkan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 78%. Meskipun terjadi fluktuasi, secara umum tingkat penyerapan anggaran masih tergolong tinggi dan menggambarkan upaya Sekretariat Daerah dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Tabel 2.8 Realisasi Keuangan Belanja APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

| No            | Unit Kerja                           | 2024                     |                          |              |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|               |                                      | Pagu dana                | Penyerapan               | %            |
| 1             | Sekretariat Daerah (Dana Rutin)      | 205.155.660.147,-        | 160.655.805.377,-        | 78,31        |
| 2             | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 5.541.686.100,-          | 4.828.537.658,-          | 87,13        |
| 3             | Biro Hukum                           | 7.471.247.900 , -        | 5.455.079.647 , -        | 73,01        |
| 4             | Biro Organisasi                      | 7.378.114.600,-          | 6.767.252.297,-          | 91,72        |
| 5             | Biro Administrasi Pembangunan        | 8.174.209.300,-          | 6.627.182.547,-          | 81,07        |
| 6             | Biro Kesejahteraan Rakyat            | 149.992.926.000,-        | 131.588.901.984,-        | 87,73        |
| 7             | Biro Administrasi Pimpinan           | 27.025.310.804           | 21.196.345.753           | 78,43        |
| 8             | Biro Umum                            | 66.696.842.900,-         | 51.512.306.186,-         | 77,23        |
| 9             | Biro Pengadaan Barang dan Jasa       | 8.262.196.700,-          | 7.046.643.959,-          | 85,29        |
| 10            | Biro Perekonomian                    | 8.205.564.700,-          | 4.593.754.897,-          | 55,98        |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>488.715.119.201,-</b> | <b>396.301.045.885,-</b> | <b>81,88</b> |

Tabel 2.8 menggambarkan realisasi keuangan belanja APBD kegiatan langsung Sekretariat Daerah pada tahun 2024 secara lebih rinci per unit kerja. Dari total pagu dana sebesar Rp. 488.715.119.201, realisasi penyerapan mencapai Rp. 396.301.045.885 atau sekitar 81,88%. Beberapa unit kerja menunjukkan kinerja penyerapan yang tinggi, seperti Biro Organisasi dengan presentase 91,72% dan Biro

Kesejahteraan Rakyat dengan 87,73%. Sementara unit kerja dengan penyerapan yang relatif rendah, adalah Biro Perekonomian yang hanya mencapai 55,98%. Data ini menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas penyerapan anggaran antarunit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas, Badan, dan Biro di bawah Pemerintah Provinsi yang membutuhkan koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif dari Sekretariat Daerah.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekretariat Daerah bertugas membantu pelaksanaan tugas kepala daerah, termasuk penyusunan kebijakan, administrasi, dan pengelolaan program prioritas.
3. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam fungsi koordinasi antara eksekutif dan legislatif, Sekretariat Daerah menjadi jembatan untuk mendukung komunikasi, penyusunan kebijakan, dan penganggaran.
4. Instansi Vertikal / Pemerintah Pusat. Kementerian atau lembaga pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam program nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Dalam konteks sinergi kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Masyarakat Kalimantan Selatan. Terutama yang menerima manfaat dari kebijakan dan program yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah, seperti pelayanan publik, program pembangunan, dan bantuan sosial.
7. ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemerintah Provinsi. Sekretariat Daerah mengatur kepegawaian, tata usaha, serta disiplin ASN di lingkungan provinsi.

8. LSM, Media, dan Organisasi Sosial. Dalam rangka transparansi, pelibatan masyarakat, serta diseminasi informasi program pemerintah.

**a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan**

**Mitra Internal Pemerintah dalam lingkup provinsi**

- Perangkat Daerah Provinsi (Dinas/Badan/Biro) yang merupakan pelaksana utama program sektoral (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dll.) dan dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Sekretariat Daerah.
- Inspektorat, Bappeda, BKD, dan lainnya untuk koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan manajemen kepegawaian.

**Lembaga Pemerintah Pusat**

- Kementerian dan Lembaga Nasional (misalnya Kemendagri, KemenPAN-RB, BPKP) yang memberikan arahan kebijakan, pengawasan, serta mendukung pendanaan, dan program pusat.

**Pemerintah Daerah**

- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sebagai mitra pelaksana program yang melibatkan kerja sama lintas tingkatan pemerintahan.

**BUMN dan BUMD**

- Untuk layanan utilitas publik (transportasi, air bersih, listrik, dll.) serta proyek pembangunan bersama.

**Sektor Swasta**

- Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS/PPP) untuk infrastruktur, layanan digital, atau proyek CSR.

**LSM dan Organisasi Kemasyarakatan**

- Mendukung program berbasis masyarakat, kampanye sosial, serta peningkatan kapasitas.

#### **Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset**

- Untuk penyediaan data, riset, kajian kebijakan, monitoring, dan evaluasi, dan pelatihan kapasitas.

#### **Media Massa**

- Sebagai mitra dalam diseminasi informasi dan strategi komunikasi publik.

#### **Masyarakat Umum dan Masyarakat Sipil**

- Sebagai penerima layanan dan partisipan aktif dalam umpan balik kebijakan, forum publik, dan pengawasan sosial.

### **b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

BUMD memberikan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah melalui:

#### **1. Penyediaan Layanan Publik yang efisien**

BUMD seperti PDAM, perusahaan transportasi daerah, atau layanan energi membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi bagian dari indikator kinerja pelayanan publik.

#### **2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kontribusi keuntungan BUMD terhadap PAD memperkuat kapasitas fiskal daerah, yang kemudian mendukung perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

#### **3. Kemitraan Program Strategis**

BUMD dapat dilibatkan dalam proyek-proyek strategis daerah yang membutuhkan sinergi lintas sektor, seperti pengembangan kawasan ekonomi, revitalisasi kota, atau digitalisasi pelayanan.

#### **4. Dukungan Logistik dan Operasional**

Dalam beberapa kasus, BUMD mendukung logistik, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas teknis yang menunjang kelancaran tugas administratif Sekretariat Daerah.

### 5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Program CSR BUMD dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

### c. **Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja sama daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Jenis-jenis kerja sama tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4 Jenis-jenis Kerja sama Daerah

| No | Jenis Kerja Sama                            | Deskripsi                                                                                                                        | Contoh                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kerja Sama Antar Daerah (KAD)               | Kerja sama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Kota di dalam provinsi atau provinsi lain di Indonesia. | Pengelolaan wilayah perbatasan, distribusi bahan pokok, penanganan bencana lintas daerah. |
| 2  | Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat          | Koordinasi pelaksanaan program nasional yang dijalankan daerah.                                                                  | Pembangunan jalan nasional. Bantuan sosial pusat, integrasi layanan publik.               |
| 3  | Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Swasta/LSM) | Kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan inovasi sosial.                                             | Proyek KPBU, program CSR di bidang pendidikan atau lingkungan.                            |
| 4  | Kerja Sama Internasional / Lintas Negara    | Kemitraan dengan daerah atau institusi dari luar negeri dalam bidang                                                             | <i>Sister Province</i> , promosi pariwisata, kerja sama agribisnis dengan negara asing.   |

|   |                                   |                                                                                          |                                                                                                       |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                   | investasi teknologi, budaya.                                                             |                                                                                                       |
| 5 | Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama | Administrasi, pengawasan, dan legalitas seluruh bentuk kerja sama daerah yang dilakukan. | Penyusunan MoU ( <i>Memorandum of Understanding</i> ), monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama |

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat daerah Kalimantan Selatan, sehingga mewujudkan visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN”.

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, sangat dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional, dan internasional.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional, dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

### 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.10 Permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

| No. | Permasalahan Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--------------------|---------|--------------|
|-----|--------------------|---------|--------------|

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penerapan kebijakan pada Sekretariat Daerah                 | Belum optimalnya dukungan dalam penerapan kebijakan                                                                                                                                        | Peraturan dan sistem prosedur kerja yang selalu berubah-ubah.                                                                                                                                |
| 2. | Pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat Daerah              | Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan SKPD lain</li> <li>2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi Setda</li> </ol> |
| 3. | <i>Standard Operating Procedure</i> pada Sekretariat Daerah | Belum lengkapnya prosedur operasi baku ( <i>Standard Operating Procedure</i> )                                                                                                             | Masih banyaknya pelaksanaan tugas yang tidak berpedoman pada SOP                                                                                                                             |
| 4. | Kualitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimal Kualitas SDM aparatur sekretariat daerah</li> <li>2. Belum optimalnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Daerah</li> <li>2. Masih rendahnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</li> </ol>  |
| 5. | Sarana dan prasarana Pada sekretariat Daerah                | Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</li> </ol>                                 |

|  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  | 2. Masih belum tersedianya anggaran yang memadai |
|--|--|--|--------------------------------------------------|

### **2.2.2 Isu Strategis**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengoordinasian kebijakan Pembangunan Daerah:

1. Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama.
2. Bidang Peraturan Perundang-undangan, Provinsi, Peraturan Undang-Undang Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum.
3. Bidang Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
5. Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
6. Bidang Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Keprotokolan
7. Bidang Pelayanan terhadap *Stakeholder* eksternal dan Internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang Pembinaan dan Advokasi, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
9. Bidang Kebijakan Perekonomian, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan BUMD dan BLUD.

#### **b. Kondisi yang Diharapkan**

Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam:

1. Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
2. Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Undang-Undang Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum.
3. Bidang Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
5. Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
6. Bidang Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan.
7. Bidang Pelayanan terhadap *stakeholder* eksternal dan internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang Pembinaan dan Advokasi, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
9. Bidang Kebijakan Perekonomian, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan BUMD dan BLUD.

#### **c. Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis lingkungan Strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

#### **d. Analisis Lingkungan Internal**

##### **Kekuatan (Strenghts)**

1. Adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Tersedianya tenaga analis dan fungsional, staf teknis yang kompeten.

#### **Kelemahan (Weaknesses)**

1. Kurangnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya pembinaan tenaga analis, fungsional, staf teknis, dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer, dll.)

#### **e. Analisis Lingkungan Eksternal**

##### **Peluang (Opportunities)**

1. Kebijakan dan komitmen Kepala Daerah terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
2. Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Tuntutan publik untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

##### **Tantangan / Ancaman (Threats)**

1. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Belum adanya pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Adanya tuntutan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **f. Asumsi Strategis**

Asumsi strategis perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis *Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT Analysis)*, sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut:

##### **Asumsi Strategis *Strenghts – Opportunities (SO)***

1. Optimallkan kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
2. Optimalkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Optimalkan tenaga analis jabatan dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

##### **Asumsi Strategis *Strenghts – Threats (ST)***

1. Manfaatkan kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Manfaatkan tenaga analis jabatan dan hasil analisa beban kerja untuk melakukan evaluasi dan kajian akademis peningkatan koordinasi

pelaksanaan program pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Asumsi Strategis *Weaknesses – Opportunities (WO)***

1. Tingkatkan pemahaman atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan kebijakan serta komitmen Kepala Daerah terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
2. Tingkatkan pembinaan staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural dengan memanfaatkan upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Tingkatkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan pengembangan penerapan akuntabilitas kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Asumsi Strategis *Weaknesses – Threats (WT)***

1. Tingkatkan pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengantisipasi memanfaatkan adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Tingkatkan pembinaan staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural untuk mengurangi dampak karena belum adanya pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **g. Prioritas Asumsi Strategis**

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategis pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Optimalkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
2. Optimalkan tenaga analis jabatan, dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.
3. Manfaatkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **h. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kunci keberhasilan atau *critical success factors* merupakan capaian kongkret dari prioritas asumsi strategis yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada tataran implementasi operasional, aspek-aspek faktor kunci keberhasilan tersebut substansinya dirinci lebih lanjut di dalam tujuan, sasaran, dan strategi sesuai dengan perubahan-perubahan kebijakan internal maupun eksternal.

Faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Penataan Lembaga Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
- b. Penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi melibatkan tenaga analis, staf teknis, dan administrasi.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Pemanfaatan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Peningkatan koordinasi pelaksanaan program pendayagunaan aparatur di seluruh Perangkat Daerah Provinsi didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana kerja (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer, dll).

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan | Permasalahan Perangkat Daerah                                                                                                                    | Isu KLHS                                                     | Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah |                                                                                                           |                                               | Isu Strategis                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                  |                                                              | Global                                                      | Nasional                                                                                                  | Regional                                      |                                                                                                                            |
| Digitalisasi Pelayanan                 | Belum maksimalnya internalisasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja Sekretariat Daerah                                                      | Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang Jasa | -                                                           | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi | Kualitas pelayanan publik masih belum optimal | Belum optimalnya Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan |
|                                        | Belum maksimalnya peran serta Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan prosedur tatakerja                             |                                                              |                                                             |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                            |
|                                        | Belum optimalnya perumusan kebijakan bidang peraturan perundang undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupatenkota, dan bantuan hukum |                                                              |                                                             |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                            |
|                                        | Belum optimalnya efektivitas dalam perumusan kebijakan pengendalian administrasi                                                                 |                                                              |                                                             |                                                                                                           |                                               |                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | pelaksanaan pembangunan daerah                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|  | Belum optimalnya efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah                                                                    |  |  |  |  |  |
|  | Belum Optimalnya tata kelola pelayanan keprotokolan dan penyusunan materi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah |  |  |  |  |  |
|  | Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah                                                                      |  |  |  |  |  |
|  | Belum optimalnya perumusan kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD dan BLUD                                          |  |  |  |  |  |
|  | Belum optimalnya Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                                                                  |  |  |  |  |  |

Dari tabel di atas, penyimpulan isu strategis dilakukan melalui analisis potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, isu lingkungan hidup strategis, serta dinamika global, nasional, dan regional. Hasil analisis menunjukkan beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya internalisasi SAKIP, budaya kerja, serta peran perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, perumusan kebijakan di berbagai bidang belum efektif, baik dalam penyusunan regulasi, pengendalian administrasi pembangunan, maupun pengadaan barang dan jasa. Ketiga, dukungan terhadap tugas pimpinan daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan penyusunan materi pendukung. Keempat, substansi kebijakan daerah pada bidang pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam, BUMD/BLUD, dan kesejahteraan rakyat dinilai belum optimal.

Selain itu, dinamika eksternal seperti digitalisasi pelayanan, penerapan prinsip ramah lingkungan, serta agenda nasional reformasi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi juga menjadi faktor yang harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah. Dengan demikian, isu-isu strategis yang dirumuskan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program prioritas yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2 Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

| <b>Indikator SDGs</b>                                                                                                                        | <b>Program</b>                                        | <b>Kegiatan</b>                                                                                     | <b>Pengampu</b>            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualitas Informatif                                                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan<br>2. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                            | Biro Administrasi Pimpinan |
| 16.3.1.(b) Persentase Orang Miskin yang Menerima Bantuan Hukum Litigasi                                                                      | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum               | 3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                            | Biro Hukum                 |
| 5.6.2* Regulasi yang Menjamin Akses yang Setara bagi Perempuan dan Laki – laki untuk Mendapatkan Pelayanan, Informasi dan Pendidikan terkait | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum               | 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan<br>2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | Biro Hukum                 |

|                                                                                                                             |                                         |                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kesehatan Seksual dan Reproduksi                                                                                            |                                         |                                                                                                     |            |
| 16.3.1.(c) Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung         | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                            | Biro Hukum |
| 16.3.3.(a) Indeks Akses terhadap Keadilan ( <i>Access to Justice Index</i> )                                                | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum<br>2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan | Biro Hukum |
| 16.10.1.(b) Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia                                                       | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan                                             | Biro Hukum |
| 16.10.1.(c) Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan terutama Kekerasan terhadap Perempuan | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan                                             | Biro Hukum |
| 16.a.1* Tersedianya Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional yang Independen yang                                           | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | -                                                                                                   | Biro Hukum |
| 16.b.1.(a) Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan Pelarangan                                   | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan                                             | Biro Hukum |

|                                                                                                                |                                                         |                                                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Diskriminasi menurut Hukum HAM                                                                                 |                                                         | 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan<br>3. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota |                                |
| 12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah | Program Kebijakan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa                                                                | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| 12.7.1.(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa                     | Program Kebijakan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan pengadaan barang dan jasa                                                                | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Renstra ini berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan Sekretariat Daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh. Dengan demikian, Renstra Setda menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kinerja organisasi menuju peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Secara substansial, tujuan Renstra Setda mencakup upaya penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kebijakan antara perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuan Renstra juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya aparatur, sehingga Sekretariat Daerah mampu memberikan dukungan administratif dan teknis yang optimal kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan strategis daerah.

Lebih lanjut, Renstra Setda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada pencapaian efektivitas layanan perkantoran, manajemen keuangan daerah, serta perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional maupun regional. Pada saat yang sama, Renstra ini juga mendukung terwujudnya sinergi antara program pemerintah pusat

dengan program prioritas daerah, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan berkeadilan.

### **3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029**

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai wujud operasionalisasi dari tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sasaran ini pada dasarnya merupakan hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam kurun waktu lima tahun, baik dalam aspek kinerja organisasi, kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, maupun dukungan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan adanya sasaran yang jelas, setiap program dan kegiatan Setda diharapkan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, sasaran Renstra Setda Kalimantan Selatan difokuskan pada peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini mencakup terwujudnya kualitas perumusan kebijakan daerah yang berbasis data dan evidence-based, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah. Selain itu, sasaran juga diarahkan pada penguatan fungsi fasilitasi dan koordinasi pembangunan, sehingga setiap kebijakan dapat terimplementasi dengan baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di samping itu, sasaran strategis Renstra Setda turut menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun etos kerja. Aparatur yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan pemerintahan modern di era digital. Dengan demikian, sasaran tidak hanya difokuskan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada pengembangan kualitas SDM aparatur yang akan menjadi penggerak utama birokrasi.

Lebih lanjut, sasaran Renstra Setda juga diarahkan pada penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Dengan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang baik, maka kinerja Sekretariat Daerah akan semakin selaras dengan prinsip good governance, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran PD**

| NSPK SASARAN<br>RPJMD YANG<br>RELEVAN                                          | TUJUAN                                                                                                                            | SASARAN | INDIKATOR                                                                                    | SATUAN     | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KET  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                                                                |                                                                                                                                   |         |                                                                                              |            |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1)                                                                            | (2)                                                                                                                               | (3)     | (4)                                                                                          |            |                  | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11) |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN | Meningkatnya Pencapaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan |         | Nilai Reformasi Birokrasi General                                                            | Angka      | 74,40            | 74.41        | 74.50 | 74.56 | 74.60 | 74.64 | 74.70 |      |
|                                                                                |                                                                                                                                   |         | Nilai Reformasi Birokrasi Tematik                                                            | Angka      | 10,25            | 10.27        | 10.32 | 10.40 | 10.50 | 10.60 | 10.69 |      |
|                                                                                |                                                                                                                                   |         | Persentase Perangkat Daerah dan Biro dengan Capaian Kinerja Organisasi minimal kategori Baik | Persentase | 100              | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |      |

|  |  |  |                                                           |        |      |       |       |       |       |       |       |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |  |  | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Sekretariat<br>Daerah | Indeks | 95   | 95    | 95.1  | 95.2  | 95.3  | 95.4  | 95.5  |  |
|  |  |  | Indeks<br>Pelayanan<br>Publik<br>Sekretariat<br>Daerah    | Indeks | 4,01 | 4.01  | 4.1   | 4.2   | 4.3   | 4.4   | 4.51  |  |
|  |  |  | Nilai SAKIP<br>Sekretariat<br>Daerah                      | Angka  | 85   | 90.01 | 90.02 | 90.03 | 90.04 | 90.05 | 90.06 |  |
|  |  |  | Indeks<br>Maturitas<br>SPIP<br>Sekretariat<br>Daerah      | Angka  | 3    | 3.00  | 03.09 | 3.18  | 3.30  | 3.45  | 3.60  |  |

|  |  |                                                                                                                 |                                                                                                                                              |            |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  |  | Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian IKU minimal 85% | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan          | Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian IKU minimal 85%          | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |                                                                                             |                                                                                                                          |            |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|  |  | Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Administrasi Umum | Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Administrasi Umum dengan capaian IKU minimal 85% | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|

### **3.3 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029**

Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 strategi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan (Biro Kesra)
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan meningkatkan kualitas Administrasi Kebijakan Pemerintahan yang Akuntabel (Biro Pemerintahan & Otda)
3. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik dan Kualitas Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah (Biro Organisasi).
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Adbang).
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (Biro Administrasi Pimpinan).
6. Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan penyusunan materi komunikasi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah (Biro Administrasi Pimpinan)
7. Mewujudkan layanan hukum yang berkualitas dan akuntabel melalui pembentukan produk hukum daerah, bantuan/layanan hukum daerah dan informasi produk hukum (Biro Hukum)
8. Meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Sangat Baik (Biro PBJ)
9. Pengembangan iklim penanaman modal (Biro Perekonomian)
10. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Biro Perekonomian)
11. Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendorong kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (Biro Perekonomian)
12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ekonomi melalui Penguatan Peran BLUD (Biro Perekonomian)
13. Meningkatkan pelayanan terhadap Stakeholder Eksternal dan Internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Umum).

**Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD**

| <b>TAHAP I<br/>(2026)</b>                                                                            | <b>TAHAP II<br/>(2027)</b>                                                                           | <b>TAHAP III<br/>(2028)</b>                                                                          | <b>TAHAP IV<br/>(2029)</b>                                                                           | <b>TAHAP V<br/>(2030)</b>                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                  | (2)                                                                                                  | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                                  | (5)                                                                                                  |
| Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia                                                            | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia                                                            | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia                                                            | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia                                                            | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia                                                            |
| Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah                   | Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah                   | Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah                   | Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah                   | Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah                   |
| Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi | Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi | Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi | Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi | Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi |
| Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang dan jasa                                                      | Digitalisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | Pengembangan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | Kolaborasi dan Sinergi terkait Pengadaan Barang dan Jasa                                             | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Resiko terkait Pengadaan Barang dan Jasa                       |
| Pemutakhiran data BUMD, BLUD, dan harga komoditas. Penyusunan baseline dan penguatan tim.            | Pembinaan tata kelola, SDM, dan koordinasi lintas sektor                                             | Fasilitasi digitalisasi pelaporan, survei IKM, dan monitoring inflasi                                | Penerapan ulang praktik efektif dan pemantauan berkelanjutan.                                        | Evaluasi capaian dan integrasi hasil ke kebijakan jangka panjang                                     |

### **3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029**

- 1.** Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama (Biro kesra).
- 2.** Peningkatan Koordinasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Biro Kesra)
- 3.** Peningkatan Koordinasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Biro Kesra)
- 4.** Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan terhadap Kinerja Biro dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (EPD) Kalimantan Selatan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).
- 5.** Mendorong Pengembangan kualitas sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah.(organisasi)
- 6.** Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) (organisasi)
- 7.** Mempercepat penyelesaian masalah Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kebijakan mendorong percepatan pelaksanaan proyek prioritas nasional dan daerah (Adbang)
- 8.** Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik (Adpim)
- 9.** Mewujudkan tata kelola layanan keprotokolan dan penyusunan materi komunikasi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah (Biro Administrasi Pimpinan)
- 10.** Terwujudnya kualitas Prodak hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM serta Layanan Hukum dan Informasi Produk Hukum (Biro Hukum).
- 11.** Mengoptimalkan dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ)
- 12.** Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PBJ)
- 13.** Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- 14.** Peningkatan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal (Biro Perekonomian).

- 15.** Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Biro Perekonomian).
- 16.** Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja BUMD secara terencana dan berkelanjutan (Biro Perekonomian)
- 17.** Mengembangkan system evaluasi kualitas pelayanan BLUD berbasis hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Biro Perekonomian)
- 18.** Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan harga dan distribusi komoditas strategis (Biro Perekonomian)
- 19.** Meningkatkan Pelayanan terhadap kerumahtanggaan daerah, ketatausahaan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan keuangan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Umum).



**Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD**

| NO  | OPERASIONALISASI NSPK                                                                                                                                                                                                                   | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                         | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD                                                                                                  | KET |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                    | (4)                                                                                                                        | (5) |
|     | Melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan teknis administrasi dan sumber daya, pemantauan dan evaluasi program kegiatan serta penyelenggaraan dukungan pengadaan barang dan jasa | Meningkatkan penataan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah                                     | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, Layanan Hukum dan Layanan Informasi Hukum                        |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional                                        | Meningkatnya kepatuhan PD terhadap prosedur dan tatakerja                                                                  |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | Meningkatkan Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi                                                                      | Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan                                     |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatkan kualitas pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi | Meningkatnya Internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan                                                    |     |

|  |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemprov Kalsel                                                                                                                        |  |
|  |  |                                                                                                          | Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Lingkup Perekonomian                                                                                                                     |  |
|  |  |                                                                                                          | Meningkatkan Tata Kelola Layanan Keprotokolan, Materi dan Komunikasi pimpinan yang responsif dan terintegrasi untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan dan kegiatan pimpinan |  |
|  |  |                                                                                                          | Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat                                                                                                           |  |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Uraian Program**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis (RENSTRA) yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Pada hakekatnya, program disusun berdasarkan bidang masalah yang merupakan acuan bagi penyusunan program Sekretariat Daerah pada periode lima tahun ke depan (2025-2029). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan untuk Sekretariat Daerah serta pendanaan indikatif per Tahun 2025-2029 adalah seperti terlihat pada Lampiran

Kegiatan strategis yang tercakup dalam program-program tersebut, merupakan program Sekretariat Daerah Provinsi yang harus dijabarkan menjadi Rencana Kinerja (Renja) Biro-Biro Sekretariat Daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan serta pengembangannya. Prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan tenaga profesional, dana, fasilitas dan keunggulan komparatif dan kompetitif Sekretariat Daerah Provinsi dan jajarannya.

Rencana Program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 sebanyak 8 Program Kerja Pembangunan yang terdiri atas 1 program rutin dan 7 program non rutin.

- a) Program Rutin
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- b) Program Non Rutin
  - 1. Program Perekonomian dan Pembangunan (Biro Perekonomian)
  - 2. Program Penataan Organisasi (Biro Organisasi)
  - 3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ)
  - 4. Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra)
  - 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemerintahan)
  - 6. Program Dasilitasi dan Koordinasi Hukum (Biro Hukum)
  - 7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Biro Adbang)

#### **4.2 Uraian Kegiatan**

- a) Program Rutin (Biro Umum & Biro Administrasi Pimpinan)
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - e. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - j. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
  - k. Fasilitasi Keprotokolan
- b) Program Non Rutin
- 1. Program Perekonomian dan Pembangunan (Biro Perekonomian)
    - a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
    - b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
    - c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
  - 2. Program Penataan Organisasi (Biro Organisasi)
    - a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
  - 3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ)
    - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - b. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
    - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - 4. Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra)
    - a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
    - b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
    - c. Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
  - 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemerintahan)
    - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
    - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
    - c. Fasilitasi Kerja Sama
  - 6. Program Dasilitasi dan Koordinasi Hukum (Biro Hukum)
    - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

- b. Fasilitasi Bantuan Hukum
- 7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Biro Adbang)
  - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD**

| NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                                                                                                                            | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                                                                                    | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |  |  | KET |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----|
| (1)                             | (2)                                                                                                                               | (3)     | (4)     | (5)    | (6)                                                                                          | (7)                           |  |  | (8) |
|                                 | Meningkatnya Pencapaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan |         |         |        | Nilai Reformasi Birokrasi General                                                            |                               |  |  |     |
|                                 |                                                                                                                                   |         |         |        | Nilai Reformasi Birokrasi Tematik                                                            |                               |  |  |     |
|                                 |                                                                                                                                   |         |         |        | Persentase Perangkat Daerah dan Biro dengan capaian kinerja organisasi minimal kategori baik |                               |  |  |     |

|  |  |                                                                                                                 |                                                                   |  |                                                                                                                                              |                              |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|  |  |                                                                                                                 |                                                                   |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah                                                                                                |                              |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |                                                                   |  | Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah                                                                                                   |                              |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |                                                                   |  | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                                                                                               |                              |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 |                                                                   |  | Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Daerah                                                                                                     |                              |  |  |  |
|  |  | Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |                                                                   |  | Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian IKU minimal 85% |                              |  |  |  |
|  |  |                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dalam pembinaan mental |  | Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama                                                                                                 | Program Kesejahteraan Rakyat |  |  |  |

|  |  |  |                                     |                                                   |                                                                                                                                                               |  |                                      |                                            |  |
|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|
|  |  |  | spiritual, dan kesejahteraan rakyat |                                                   |                                                                                                                                                               |  |                                      |                                            |  |
|  |  |  |                                     |                                                   | Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sadakah (ZIS)                                                                                            |  |                                      |                                            |  |
|  |  |  |                                     |                                                   | Persentase Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti |  |                                      |                                            |  |
|  |  |  |                                     | Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual | Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual                                                               |  | Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual |                                            |  |
|  |  |  |                                     |                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                                           |  |                                      | Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual |  |

|  |  |  |  |                                                                           |                                                                                                                                           |  |                                                              |                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                           | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                           |  |                                                              | Fasilitasi kelembagaan bina spiritual                                                                                 |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar | Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar                                                |  | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar |                                                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan |  |                                                              | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan  |  |
|  |  |  |  |                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  |  |                                                              | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |  |

|  |  |  |  |                                                                               |                                                                                                                                         |  |                                                                  |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial   |  |                                                                  | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                     |  | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar |                                                                                                                    |  |
|  |  |  |  |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |  |                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |  |

|  |  |  |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                            |                                         |                                          |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Meningkatnya kualitas produk hukum Daerah, bantuan hukum Daerah, serta koordinasi dan fasilitasi bidang hukum |                                                                                                           | Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan                                             | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum |                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                               |                                                                                                           | Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah                                       |                                         |                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                               |                                                                                                           | Indeks Reformasi Hukum (IRH)                                                               |                                         |                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                               |                                                                                                           | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)                                                            |                                         |                                          |  |  |
|  |  |  |                                                                                                               | Tercapainya Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota | Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan; |                                         | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan |  |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                           |  |  |                                                        |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Persentase Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan |  |  |                                                        |  |
|  |  |  |  |  | Presentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Yang Terpublikasi                        |  |  |                                                        |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Produk Hukum yang disusun                                                          |  |  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan          |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun                                                |  |  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                    |  |  | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi                       |  |  | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota    |  |

|  |  |  |  |                                                                                                 |                                                                                                               |  |                               |                                                           |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terselesaikan<br>nya Fasilitas<br>Masalah<br>Hukum<br>(Litigasi) Dan<br>(Non Litigasi &<br>HAM) | Persentase<br>Bantuan/Layanan Hukum<br>Litigasi Di Pengadilan yang<br>diberikan                               |  | Fasilitas<br>Bantuan<br>Hukum |                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                 | Persentase<br>Bantuan/Layanan Hukum<br>Non Litigasi Di Luar<br>Pengadilan & P5 HAM<br>Kab/Kota yang diberikan |  |                               |                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                 | Jumlah Masalah Hukum<br>yang Ddselesaikan                                                                     |  |                               | Fasilitas Penyelesaian<br>Masalah Hukum                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                 | Jumlah Masalah Non<br>Litigasi dan HAM yang<br>diselesaikan                                                   |  |                               | Fasilitas Penyelesaian<br>Masalah Non Litigasi Dan<br>HAM |  |

|  |  |  |                                                                                   |  |                                                                     |                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama |  | Nilai Rata-rata Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah |  |  | <p>Nilai rata-rata kebijakan bidang pem dan Otda = (Nilai LPPD + Nilai SPM + Nilai Kerjasama + Nilai Penyelesaian Batas Daerah dan Konflik Pertanahan)/4</p> <p>Nilai LPPD sesuai Hasil Dagri<br/> Nilai SPM sesuai Hasil Dagri<br/> Nilai Kerjasama =<br/> = Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kerja Sama</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                             |                                                                                         |  |                                |  |                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                             |                                                                                         |  |                                |  | Nilai Penyelesaian Batas Daerah dan Konflik =<br>Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pemerintahan |
|  |  |  |  |                                             | Nilai LPPD                                                                              |  |                                |  |                                                                                                                                          |
|  |  |  |  |                                             | Persentase Realisasi Capaian SPM                                                        |  |                                |  |                                                                                                                                          |
|  |  |  |  | Meningkatnya Fasilitasi Bidang Pemerintahan | Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pemerintahan |  | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan |  |                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |                                               |                                                                                           |  |                            |                                                 |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                      |  |                            | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan |  |
|  |  |  |  |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah                                                     |  |                            | Fasilitasi Penataan Wilayah                     |  |
|  |  |  |  |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                        |  |                            | Fasilitasi Pemerintahan Umum                    |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Fasilitasi Bidang Otonomi Daerah | Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Otonomi Daerah |  | Pelaksanaan Otonomi Daerah |                                                 |  |
|  |  |  |  |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                       |  |                            | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  |  |

|  |  |  |  |                                          |                                                                                      |  |                      |                                           |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan      |  |                      | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan  |  |
|  |  |  |  |                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                       |  |                      | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Fasilitas Bidang Kerja Sama | Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kerja Sama |  | Fasilitas Kerja Sama |                                           |  |
|  |  |  |  |                                          | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi                                 |  |                      | Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah     |  |
|  |  |  |  |                                          | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi                               |  |                      | Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta   |  |

|  |  |                                                                                                        |                                                          |                                                                       |                                                                                                                                     |                                            |                                                          |                                 |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|  |  |                                                                                                        |                                                          |                                                                       | Jumlah Kerja Sama yang dievaluasi                                                                                                   |                                            |                                                          | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama |  |
|  |  | Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan |                                                          |                                                                       | Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah Koordinasi Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian IKU minimal 85% |                                            |                                                          |                                 |  |
|  |  |                                                                                                        | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan |                                                                       | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan                                                                                      | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan |                                                          |                                 |  |
|  |  |                                                                                                        |                                                          | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi masalah Pelaksanaan Pembangunan Daerah sumber Dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder       |                                            | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                 |  |

|  |  |  |  |                                                                         |                                                                                                                                    |  |                                                  |                                                                 |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Laporan hasil<br>Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan APBD                                               |  |                                                  | Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan APBD    |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan APBN                                               |  |                                                  | Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan APBN    |  |
|  |  |  |  |                                                                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Wilayah I, II<br>dan III                           |  |                                                  | Pengendalian Administrasi<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Wilayah |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya<br>Pengendalian<br>Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan | Persentase Permasalahan<br>Pembangunan Daerah<br>yang dianalisa dan<br>dirumuskan sebagai bahan<br>kebijakan pembangunan<br>daerah |  | Pelaporan<br>Pelaksanaan<br>Pembangu<br>n Daerah |                                                                 |  |

|  |  |  |                                                                           |  |                                                                                  |                                      |  |                                                          |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                           |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan |                                      |  | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah              |  |
|  |  |  |                                                                           |  | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              |                                      |  | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 |  |
|  |  |  |                                                                           |  | Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan pembangunan daerah                      |                                      |  | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah |  |
|  |  |  | Meningkatnya Dividen yang disetorkan oleh BUMD kepada pemerintah provinsi |  | Persentase Peningkatan Dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi       | Program Perekonomian dan Pembangunan |  |                                                          |  |

|  |  |  |                                               |                                                                |                                                          |  |                                                   |                                                |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Terwujudnya BLUD dengan nilai IKM sangat baik |                                                                | Persentase BLUD dengan Nilai IKM/SKM sangat Baik         |  |                                                   |                                                |  |
|  |  |  | Terjaganya kestabilan inflasi                 |                                                                | Tingkat Inflasi                                          |  |                                                   |                                                |  |
|  |  |  |                                               | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | Persentase Analisis Ekonomi yang Ditindaklanjuti         |  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian |                                                |  |
|  |  |  |                                               |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro |  |                                                   | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro |  |
|  |  |  |                                               |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro |  |                                                   | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro |  |

|  |  |  |  |                                                                    |                                                                                                                    |  |                                                       |                                                                                               |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Persentase Analisis Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti                                                          |  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam |                                                                                               |  |
|  |  |  |  |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan |  |                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan |  |
|  |  |  |  |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup            |  |                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup            |  |
|  |  |  |  |                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                               |  |                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                               |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD    | Persentase Analisis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti                                                             |  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD    |                                                                                               |  |

|  |  |  |                                                                     |  |                                                                                                                                                      |                                                           |  |                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                     |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  |                                                           |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  |  |
|  |  |  |                                                                     |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                                                           |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |  |
|  |  |  |                                                                     |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |                                                           |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |  |
|  |  |  | Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi |  | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                         | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa |  |                                                                                                                                 |  |

|  |  |  |                    |                                                                                                                |                                                                              |  |                                                  |                                                 |  |
|--|--|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Kalimantan Selatan |                                                                                                                |                                                                              |  |                                                  |                                                 |  |
|  |  |  |                    |                                                                                                                | Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan                         |  |                                                  |                                                 |  |
|  |  |  |                    | Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan kualitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase UKPBJ Provinsi Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3 |  | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                                 |  |
|  |  |  |                    |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa          |  |                                                  | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa |  |
|  |  |  |                    |                                                                                                                | Persentase SDM pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten          |  |                                                  |                                                 |  |

|  |  |  |  |                                                                      |                                                                                                                                  |  |                                       |                                                                              |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                              |  |                                       | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa            |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya kualitas layanan konsultasi pendampingan dan bimtek PBJ | Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa                                                           |  |                                       |                                                                              |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                   |  |                                       | Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |  |
|  |  |  |  | Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah | Persentase proses pengadaan barang dan jasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu |  | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                              |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                          |  |                                       | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                               |  |

|  |  |  |  |                                                                                                            |                                                                                                                |  |                                                 |                                                   |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                            | Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up                                       |  |                                                 |                                                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                     |  |                                                 | Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa             |  |
|  |  |  |  |                                                                                                            | Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                            |  |                                                 |                                                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         |  |                                                 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang sesuai ketentuan | Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan secara Elektronik yang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku |  | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik |                                                   |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                           |  |  |                                                         |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                             |  |  | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik          |  |
|  |  |  |  |  | Rasio Gangguan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang dapat diselesaikan |  |  |                                                         |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                    |  |  | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |  |
|  |  |  |  |  | Persentase Pemenuhan Pelayanan dalam memberi Informasi seputar Pengadaan Barang dan Jasa  |  |  |                                                         |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                            |  |  | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         |  |

|  |  |                                                                                             |                                                                         |                                                        |                                                                                                                          |                             |                                                          |                                           |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|  |  | Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Administrasi Umum |                                                                         |                                                        | Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Administrasi Umum dengan capaian IKU minimal 85% |                             |                                                          |                                           |  |
|  |  |                                                                                             | Meningkatnya Internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |                                                        | Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dengan Baik                                                               | Program Penataan Organisasi |                                                          |                                           |  |
|  |  |                                                                                             |                                                                         | Meningkatnya kualitas penerapan RB di Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang mampu membuat dan melaksanakan Rencana Aksi RB General yang berkualitas                 |                             | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                           |  |
|  |  |                                                                                             |                                                                         |                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                     |                             |                                                          | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |  |
|  |  |                                                                                             | Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan           |                                                        | Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                  |                             |                                                          |                                           |  |

|  |  |  |                       |                                                          |                                                                                          |  |                                                          |                                               |  |
|--|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|  |  |  | akuntabilitas kinerja |                                                          |                                                                                          |  |                                                          |                                               |  |
|  |  |  |                       |                                                          | Persentase Perangkat Daerah dengan Kualifikasi nilai SAKIP minimal AA                    |  |                                                          |                                               |  |
|  |  |  |                       | Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah | Persentase perangkat daerah dengan nilai pelaporan kinerja minimal 13 poin               |  | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                               |  |
|  |  |  |                       |                                                          | Persentase perangkat daerah yang tertib menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan |  |                                                          |                                               |  |
|  |  |  |                       |                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                       |  |                                                          | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja |  |

|  |  |  |                                                                           |                                                                        |                                                                                |  |                                                          |                                   |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|  |  |  | Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah                                |                                                                        | Indeks BerAKHLAK Perangkat Daerah                                              |  |                                                          |                                   |  |
|  |  |  |                                                                           | Meningkatnya penerapan budaya kerja perangkat daerah                   | Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja dengan baik           |  | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                   |  |
|  |  |  |                                                                           |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                         |  |                                                          | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja |  |
|  |  |  | Terbentuknya kelembagaan yang sesuai ketentuan di wilayah Provinsi Kalsel |                                                                        | Indeks Kelembagaan Provinsi                                                    |  |                                                          |                                   |  |
|  |  |  |                                                                           | Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelembagaan provinsi dan kab/kota | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Evaluasi kelembagaannya |  | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                   |  |

|  |  |  |  |                                                                      |                                                                     |  |                                              |                                                |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                      | Persentase Kab/Kota yang di laksanakan Evaluasi kelembagaan nya     |  |                                              |                                                |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota            |  |                                              | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi       |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota |  |                                              | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Tersusunnya Perangkat Daerah dengan Dokumen Analisis Jabatan Lengkap | Persentase Perangkat Daerah dengan dokumen analisis jabatan lengkap |  | Fasilitasi Kelembagaa n dan Analisis Jabatan |                                                |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota |  |                                              | Penataan Analisis Jabatan                      |  |

|  |  |  |                                                                               |                                                                             |                                                                          |  |                                                          |                                         |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
|  |  |  | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |                                                                             | Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)     |  |                                                          |                                         |  |
|  |  |  |                                                                               | Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria pelayanan publik "Baik"      |  | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                         |  |
|  |  |  |                                                                               |                                                                             | Nilai Rata-rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel                        |  |                                                          |                                         |  |
|  |  |  |                                                                               |                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik             |  |                                                          | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik |  |
|  |  |  | Meningkatnya ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi                              |                                                                             | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik" |  |                                                          |                                         |  |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                                              |  |                                                          |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |                                                                  | Jumlah Dokumen Proses Bisnis Pemda                                                           |  |                                                          |  |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis                                  |  |                                                          |  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan Tata Laksana Provinsi Kalimantan Selatan | Persentase Perangkat Daerah patuh SOP                                                        |  | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |  |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Persentase PD yang memiliki dokumen rancangan probis (indikator Tahun 2026)                  |  |                                                          |  |  |
|  |  |  |  |                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan peta proses bisnis (indikator Tahun 2027-2030) |  |                                                          |  |  |

|  |  |  |                                                                       |  |                                                                   |                                                       |  |                                      |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                       |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan        |                                                       |  | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan |  |
|  |  |  | Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah |  | Persentase Kegiatan Tepat Waktu                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |                                      |  |
|  |  |  |                                                                       |  | Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu                      |                                                       |  |                                      |  |
|  |  |  |                                                                       |  | Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal                 |                                                       |  |                                      |  |
|  |  |  |                                                                       |  | Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat |                                                       |  |                                      |  |

|  |  |  |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |  |                                                 |                                                                                       |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                  | Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat                                                                                                       |  |                                                 |                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik | Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik                                                                                    |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja |                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |  |                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |
|  |  |  |  |                                                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
|  |  |  |  |                                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |  |                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |  |

|  |  |  |  |                                                                                            |                                                                                                                 |  |                                                 |                                                                           |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Data Statistik<br>Sektoral Daerah yang<br>Telah Dikumpulkan dan<br>Diperiksa Lingkup<br>Perangkat Daerah |  |                                                 | Pelaksanaan Pengumpulan<br>Data Statistik Sektoral<br>Daerah              |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya<br>Persentase<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>baik | Persentase Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah yang baik                                               |  | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                         |  |                                                 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                        |  |                                                 | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                          |  |
|  |  |  |  |                                                                                            | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                    |  |                                                 | Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD |  |

|  |  |  |  |                                                                                          |                                                                                                                                                   |  |                                                        |                                                                               |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |  |                                                        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |  |                                                        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik                                                                       |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                                                                               |  |
|  |  |  |  |                                                                                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |  |                                                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |  |

|  |  |  |  |                                                                             |                                                                                     |  |                                           |                                                               |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik | Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik                     |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                               |  |
|  |  |  |  |                                                                             | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              |  |                                           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |  |
|  |  |  |  |                                                                             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |  |                                           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |  |
|  |  |  |  |                                                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  |                                           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |
|  |  |  |  |                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                |  |                                           | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      |  |

|  |  |  |  |                                                                      |                                                                                        |  |                                    |                                                                  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  |                                    | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik                                |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |  |                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |  |                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|  |  |  |  |                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |  |                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |                                                                        |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  |

|  |  |  |  |                                                                                                    |                                                                                       |  |                                                                  |                                                                   |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   |  |                                                                  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  |                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    |  |                                                                  | Pengadaan Mebel                                                   |  |
|  |  |  |  |                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               |  |                                                                  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan                              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik             |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                   |  |

|  |  |  |  |                  |                                                                                        |  |  |                                                         |  |
|--|--|--|--|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Daerah yang baik |                                                                                        |  |  |                                                         |  |
|  |  |  |  |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |  |
|  |  |  |  |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |
|  |  |  |  |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       |  |
|  |  |  |  |                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |  |

|  |  |  |  |                                                                                                         |                                                                                                        |  |                                                                       |                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik             |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                    |  |
|  |  |  |  |                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya |  |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  |  |  |  |                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |  |                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                         | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              |  |                                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |  |
|  |  |  |  |                                                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |  |                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  |

|  |  |  |  |                                                                                                   |                                                                                                          |  |                                                                             |                                                                                              |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |                                                                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |                                                                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |
|  |  |  |  |                                                                                                   | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      |  |                                                                             | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                              |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |  | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                              |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                        |  |                                           |                                                                     |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                                                                                      |                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |  |                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |  |
|  |  |  | Meningkatnya Tata Kelola Layanan Keprotokolan dan Penyusunan Materi Komunikasi Pimpinan untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah |                                                           | Persentase Pemenuhan Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan tepat waktu |  |                                           |                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                      | Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   |  | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan |                                                                     |  |

|  |  |  |  |                                             |                                                                                     |  |                        |                                                                |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |                                             | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                       |  |                        | Penyiapan Materi Pimpinan                                      |  |
|  |  |  |  |                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                  |  |                        | Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                  |  |
|  |  |  |  |                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                     |  |                        | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                               |  |
|  |  |  |  | Tercapainya Kualitas Fasilitas Keprotokolan | Persentase Tercapainya Kualitas Fasilitas Keprotokolan                              |  | Fasilitas Keprotokolan |                                                                |  |
|  |  |  |  |                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     |  |                        | Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     |  |
|  |  |  |  |                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |  |                        | Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |  |

|  |  |  |  |  |                                                        |  |  |                                      |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Laporan<br>Pengelolaan Hubungan<br>Keprotokolan |  |  | Pengelolaan Hubungan<br>Keprotokolan |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan menggambarkan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode perencanaan. Tabel ini menyajikan keterkaitan antara bidang urusan, indikator kinerja, serta target capaian tahunan yang diukur melalui outcome dan output. Selain itu, tabel memuat baseline, target kinerja, serta alokasi pagu indikatif untuk setiap tahun mulai 2025 hingga 2029. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. Sub kegiatan beserta kinerja, indikator , target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 akan di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN |                              |                                                                                                       |  |  | INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT                                       | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | KET |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----|
|                                                    |                              |                                                                                                       |  |  |                                                                    |        |                  | 2025                            |                  | 2026   |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |     |
|                                                    |                              |                                                                                                       |  |  |                                                                    |        |                  | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |     |
| (1)                                                |                              |                                                                                                       |  |  | (2)                                                                |        | (3)              |                                 |                  | (4)    |                  | (5)    |                  | (6)    |                  | (7)    |                  | (8)    |                  | (9) |
|                                                    | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT |                                                                                                       |  |  |                                                                    |        |                  |                                 | Rp84,741,700,000 |        | Rp67,652,132,400 |        | Rp67,902,445,290 |        | Rp69,219,752,729 |        | Rp69,967,326,058 |        | Rp70,785,943,773 |     |
|                                                    |                              | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Mental Spiritual, dan Kesejahteraan Rakyat |  |  | Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama                       | Poin   | 74.01            | 74.03                           | Rp84,741,700,000 | 74.7   | Rp67,652,132,400 | 75.10  | Rp67,902,445,290 | 76     | Rp69,219,752,729 | 75.91  | Rp69,967,326,058 | 76     | Rp70,785,943,773 |     |
|                                                    |                              |                                                                                                       |  |  | Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sadakah (ZIS) | Persen | 32               | 32                              |                  | 33     |                  | 34     |                  | 35     |                  | 37     |                  | 48     |                  |     |

|  |  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
|  |  |  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persentase Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti                                                                                                                                      | Persen  | 100 | 100 |                  | 100 |                  | 100 |                  | 100 |                  | 100 |                  | 100 |                  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                            | Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                            | Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang bina mental spiritual                                                                                                                                                                                                   | Persen  | 100 | 100 | Rp68,017,920,000 | 100 | Rp52,102,132,400 | 100 | Rp52,294,910,290 | 100 | Rp53,309,431,550 | 100 | Rp53,885,173,410 | 100 | Rp54,515,629,939 |  |
|  |  |  |                                                                  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                | Unit    | 300 | 320 | Rp42,808,960,000 | 300 | Rp26,302,132,400 | 350 | Rp26,399,450,290 | 370 | Rp26,911,599,626 | 400 | Rp27,202,244,901 | 420 | Rp27,520,511,167 |  |
|  |  |  |                                                                  | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Unit    | 170 | 200 | Rp25,208,960,000 | 200 | Rp25,800,000,000 | 250 | Rp25,895,460,000 | 275 | Rp26,397,831,924 | 300 | Rp26,682,928,509 | 320 | Rp26,995,118,772 |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | Meningkatnya Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar                                                                                                                                                                                                     | Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang pelayanan dasar                                                                                                                                                                                                         | Persen  | 100 | 100 | Rp14,848,780,000 | 100 | Rp14,550,000,000 | 100 | Rp14,603,835,000 | 100 | Rp14,887,149,399 | 100 | Rp15,047,930,613 | 100 | Rp15,223,991,401 |  |
|  |  |  |                                                                  | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                          | Dokumen | 1   | 100 | Rp13,555,420,000 | 1   | Rp13,250,000,000 | 1   | Rp13,299,025,000 | 1   | Rp13,557,026,085 | 1   | Rp13,703,441,967 | 1   | Rp13,863,772,238 |  |
|  |  |  |                                                                  | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                           | Dokumen | 1   | 1   | Rp993,360,000    | 1   | Rp1,000,000,000  | 1   | Rp1,003,700,000  | 1   | Rp1,023,171,780  | 1   | Rp1,034,222,035  | 1   | Rp1,046,322,433  |  |
|  |  |  |                                                                  | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                              | Dokumen | 1   | 1   | Rp300,000,000    | 1   | Rp300,000,000    | 1   | Rp301,110,000    | 1   | Rp306,951,534    | 1   | Rp310,266,611    | 1   | Rp313,896,730    |  |
|  |  |  | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang kesra non pelayanan dasar                                                                                                                                                                                               | Persen  | 100 | 100 | Rp1,875,000,000  | 100 | Rp1,000,000,000  | 100 | Rp1,003,700,000  | 100 | Rp1,023,171,780  | 100 | Rp1,034,222,035  | 100 | Rp1,046,322,433  |  |
|  |  |  |                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Dokumen | 1   | 1   | Rp1,275,000,000  | 1   | Rp400,000,000    | 1   | Rp401,480,000    | 1   | Rp409,268,712    | 1   | Rp413,688,814    | 1   | Rp418,528,973    |  |
|  |  |  |                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Dokumen | 1   | 1   | Rp300,000,000    | 1   | Rp300,000,000    | 1   | Rp301,110,000    | 1   | Rp306,951,534    | 1   | Rp310,266,611    | 1   | Rp313,896,730    |  |
|  |  |  |                                                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             | Dokumen | 1   | 1   | Rp300,000,000    | 1   | Rp300,000,000    | 1   | Rp301,110,000    | 1   | Rp306,951,534    | 1   | Rp310,266,611    | 1   | Rp313,896,730    |  |

|  |                             |                                                                         |                                                          |                                                        |                                                                                                          |         |     |     |                 |       |                 |       |                 |     |                 |       |                 |     |                 |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|--|
|  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI |                                                                         |                                                          |                                                        |                                                                                                          |         |     |     | Rp3,624,118,400 |       | Rp3,014,602,100 |       | Rp3,025,756,128 |     | Rp3,084,455,797 |       | Rp3,117,767,919 |     | Rp3,154,245,804 |  |
|  |                             | Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah                              |                                                          |                                                        | Indeks BERAKHLAK Perangkat Daerah                                                                        | Indeks  | -   | -   | Rp282,146,400   | 79.50 | Rp234,695,700   | 79.70 | Rp235,564,074   | 80  | Rp240,134,017   | 80.00 | Rp242,727,465   | 80  | Rp245,567,376   |  |
|  |                             |                                                                         | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya penerapan budaya kerja perangkat daerah   | Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja dengan baik                                     | Persen  | 100 | 100 | Rp282,146,400   | 100   | Rp234,695,700   | 100   | Rp235,564,074   | 100 | Rp240,134,017   | 100   | Rp242,727,465   | 100 | Rp245,567,376   |  |
|  |                             |                                                                         |                                                          | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                      | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                   | Laporan | 1   | 1   | Rp282,146,400   | 1     | Rp234,695,700   | 1     | Rp235,564,074   | 1   | Rp240,134,017   | 1     | Rp242,727,465   | 1   | Rp245,567,376   |  |
|  |                             | Meningkatnya Internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan |                                                          |                                                        | Persentase perangkat daerah yang menerapkan RB dengan baik                                               | Persen  | 100 | 100 | Rp376,946,400   | 100   | Rp313,552,600   | 100   | Rp314,712,745   | 100 | Rp320,818,172   | 100   | Rp324,283,008   | 100 | Rp328,077,119   |  |
|  |                             |                                                                         | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya kualitas penerapan RB di Perangkat Daerah | Persentase perangkat daerah yang mampu membuat dan melaksanakan Rencana Aksi RB General yang berkualitas | Persen  | 100 | 100 | Rp376,946,400   | 100   | Rp313,552,600   | 100   | Rp314,712,745   | 100 | Rp320,818,172   | 100   | Rp324,283,008   | 100 | Rp245,567,376   |  |

|  |  |                                                      |                                                          |                                                                  |                                                                                              |         |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|--|--|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
|  |  |                                                      |                                                          | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                        | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi                                         | Dokumen | 1   | 1   | Rp376,946,400 | 1   | Rp313,552,600 | 1   | Rp314,712,745 | 1   | Rp320,818,172 | 1   | Rp324,283,008 | 1   | Rp328,077,119 |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Pemprov Kalsel |                                                          |                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik"                     | Persen  | 80  | 80  | Rp891,796,800 | 82  | Rp741,816,900 | 84  | Rp744,561,623 | 86  | Rp759,006,118 | 88  | Rp767,203,384 | 90  | Rp776,179,664 |  |
|  |  |                                                      |                                                          |                                                                  | Jumlah dokumen proses bisnis pemda                                                           | Dokumen | 1   | -   |               | 1   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -             | -   | -             |  |
|  |  |                                                      |                                                          |                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis                                  | Persen  | 100 | -   |               | -   | -             | 100 | -             | 100 | -             | 100 | -             | 100 | -             |  |
|  |  |                                                      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Terlaksananya Pembinaan Tata Laksana Provinsi Kalimantan Selatan | Persentase Perangkat Daerah patuh SOP                                                        | Persen  | 100 | 100 | Rp891,796,800 | 100 | Rp741,816,900 | 100 | Rp744,561,623 | 100 | Rp759,006,118 | 100 | Rp767,203,384 | 100 | Rp776,179,664 |  |
|  |  |                                                      |                                                          |                                                                  | Persentase PD yang memiliki dokumen rancangan probis (indikator Tahun 2026)                  | Persen  | -   | -   |               | 100 |               | -   |               | -   |               | -   |               | -   |               |  |
|  |  |                                                      |                                                          |                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan peta proses bisnis (indikator Tahun 2027-2030) | Persen  | -   | -   |               | -   |               | 100 |               | 100 |               | 100 |               | 100 |               |  |

|  |  |                                                                                                      |                                                          |                                                          |                                                                                          |         |       |       |               |       |               |       |               |     |               |       |               |     |               |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-------|---------------|-----|---------------|--|
|  |  |                                                                                                      |                                                          | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                | Dokumen | 1     | 1     | Rp891,796,800 | 1     | Rp741,816,900 | 1     | Rp744,561,623 | 1   | Rp759,006,118 | 1     | Rp767,203,384 | 1   | Rp776,179,664 |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah |                                                          |                                                          | Nilai laporan kinerja pemerintah daerah                                                  | Point   | 12.34 | 12.5  | Rp502,570,500 | 12.55 | Rp418,049,700 | 12.6  | Rp419,596,484 | 13  | Rp427,736,656 | 13    | Rp432,356,212 | 13  | Rp437,414,779 |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                          |                                                          | Persentase perangkat daerah dengan kualifikasi Nilai SAKIP minimal AA                    | Persen  | 4.25  | 19.00 |               | 28.57 |               | 38.77 |               | 49  |               | 59.18 |               | 69  |               |  |
|  |  |                                                                                                      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah | Persentase perangkat daerah dengan nilai pelaporan kinerja minimal 13 poin               | Persen  | -     | -     | Rp502,570,500 | 80    | Rp418,049,700 | 100   | Rp419,596,484 | 100 | Rp427,736,656 | 100   | Rp432,356,212 | 100 | Rp437,414,779 |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                          |                                                          | Persentase perangkat daerah yang tertib menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan | Persen  | 100   | 100   |               | 100   |               | 85    |               | 90  |               | 100   |               | 100 |               |  |
|  |  |                                                                                                      |                                                          | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja            | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                       | Dokumen | 1     | 1     | Rp502,570,500 | 1     | Rp418,049,700 | 1     | Rp419,596,484 | 1   | Rp427,736,656 | 1     | Rp432,356,212 | 1   | Rp437,414,779 |  |

|  |  |                                                                           |                                                          |                                                                             |                                                                      |         |     |     |                 |      |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |  | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah                   |                                                          |                                                                             | Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A) | Unit    | 3   | 4   | Rp292,175,000   | 5    | Rp243,016,000   | 6   | Rp243,915,159   | 7   | Rp248,647,113   | 8   | Rp251,332,502   | 9   | Rp254,273,092   |  |
|  |  |                                                                           | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan pelayanan publik | Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria pelayanan publik "Baik"  | Point   | 85  | 92  | Rp292,175,000   | 93   | Rp243,016,000   | 94  | Rp243,915,159   | 95  | Rp248,647,113   | 96  | Rp251,332,502   | 98  | Rp254,273,092   |  |
|  |  |                                                                           |                                                          |                                                                             | Nilai Rata-rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel                    | Point   | 90  | 90  |                 | 95   |                 | 96  |                 | 97  |                 | 98  |                 | 99  |                 |  |
|  |  |                                                                           |                                                          | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik         | Dokumen | 1   | 1   | Rp292,175,000   | 1    | Rp243,016,000   | 1   | Rp243,915,159   | 1   | Rp248,647,113   | 1   | Rp251,332,502   | 1   | Rp254,273,092   |  |
|  |  | Terbentuknya kelembagaan yang sesuai ketentuan di wilayah Provinsi Kalsel |                                                          |                                                                             | Indeks Kelembagaan Provinsi                                          | Indeks  | -   | -   | Rp1,278,483,300 | 82.3 | Rp1,063,471,200 | 83  | Rp1,067,406,043 | 83  | Rp1,088,113,721 | 83  | Rp1,099,865,349 | 83  | Rp1,112,733,773 |  |
|  |  |                                                                           | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              | Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelembagaan provinsi dan kab/kota      | Persentase Kab/Kota yang di laksanakan Evaluasi kelembagaan nya      | Persen  | 100 | 100 | Rp1,036,833,300 | 100  | Rp862,461,600   | 100 | Rp865,652,708   | 100 | Rp882,446,371   | 100 | Rp891,976,791   | 100 | Rp902,412,920   |  |

|  |                                            |                                                          |                                             |                                                                      |                                                                                               |         |     |     |                 |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|--|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
|  |                                            |                                                          |                                             |                                                                      | Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Evaluasi kelembagaannya                | Persen  | 100 | 100 |                 | 100 | -             | 100 | -             | 100 | -             | 100 | -             | 100 |               |  |
|  |                                            |                                                          |                                             | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                             | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan provinsi                                            | Dokumen | 1   | 1   | Rp811,792,500   | 1   | Rp675,267,500 | 1   | 677,765,990   | 1   | Rp690,914,650 | 1   | 698,376,528   | 1   | Rp706,547,534 |  |
|  |                                            |                                                          |                                             | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                           | Dokumen | 1   | 1   | Rp225,040,800   | 1   | Rp187,194,100 | 1   | 187,886,718   | 1   | Rp191,531,721 | 1   | 193,600,263   | 1   | Rp195,865,386 |  |
|  |                                            |                                                          | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Tersusunnya Perangkat Daerah dengan Dokumen Analisis Jabatan Lengkap | Persentase Perangkat Daerah dengan dokumen analisis jabatan lengkap                           | Persen  | 70  | 70  | Rp241,650,000   | 100 | Rp201,009,600 | 100 | Rp201,753,336 | 100 | Rp205,667,350 | 100 | Rp207,888,558 | 100 | Rp210,320,854 |  |
|  |                                            |                                                          |                                             | Penataan Analisis Jabatan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | Dokumen | 4   | 4   | Rp241,650,000   | 4   | Rp201,009,600 | 4   | Rp201,753,336 | 4   | Rp205,667,350 | 4   | Rp207,888,558 | 4   | Rp210,320,854 |  |
|  | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |                                                          |                                             |                                                                      |                                                                                               |         |     |     | Rp1,483,257,000 |     | Rp864,744,700 |     | Rp867,944,255 |     | Rp884,782,374 |     | Rp894,338,024 |     | Rp904,801,778 |  |
|  |                                            | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan |                                             |                                                                      | Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan                                                | Persen  | -   | -   | Rp1,483,257,000 | 100 | Rp864,744,700 | 100 | Rp867,944,255 | 100 | Rp884,782,374 | 100 | Rp894,338,024 | 100 | Rp904,801,778 |  |

|  |  |  |                                                          |                                                                       |                                                                                                                                |         |     |     |                 |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
|  |  |  | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. | Persen  | 100 | 100 | Rp1,033,257,000 | 100 | Rp621,768,500 | 100 | Rp624,069,043 | 100 | Rp636,175,983 | 100 | Rp643,046,684 | 100 | Rp650,570,330 |  |
|  |  |  |                                                          |                                                                       | Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder                           | Persen  | 100 | 100 |                 | 100 |               | 100 |               | 100 |               | 100 |               | 100 |               |  |
|  |  |  |                                                          | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                    | Laporan | 1   | 1   | Rp303,257,000   | 1   | Rp187,288,000 | 1   | Rp187,980,966 | 1   | Rp191,627,796 | 1   | Rp193,697,377 | 1   | Rp195,963,636 |  |
|  |  |  |                                                          | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                    | Laporan | 1   | 1   | Rp280,000,000   | 1   | Rp196,227,000 | 1   | Rp196,953,040 | 1   | Rp200,773,929 | 1   | Rp202,942,287 | 1   | Rp205,316,712 |  |
|  |  |  |                                                          | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                 | Laporan | 3   | 3   | Rp450,000,000   | 3   | Rp238,253,500 | 3   | Rp239,135,038 | 3   | Rp243,774,258 | 3   | Rp246,407,020 | 3   | Rp249,289,982 |  |
|  |  |  | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 | Meningkatnya Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan           | Persentase Permasalahan Pembangunan daerah yang dianalisa dan dirumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah            | persen  | 100 | 100 | Rp450,000,000   | 100 | Rp242,976,200 | 100 | Rp243,875,212 | 100 | Rp248,606,391 | 100 | Rp251,291,340 | 100 | Rp254,231,449 |  |
|  |  |  |                                                          | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan                                               | Dokumen | 3   | 3   | Rp150,000,000   | 4   | Rp80,849,000  | 4   | Rp81,148,141  | 4   | Rp82,722,415  | 4   | Rp83,615,817  | 4   | Rp84,594,122  |  |
|  |  |  |                                                          | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                            | Laporan | 1   | 1   | Rp150,000,000   | 4   | Rp81,502,400  | 4   | Rp81,803,959  | 4   | Rp83,390,956  | 4   | Rp84,291,578  | 4   | Rp85,277,789  |  |

|  |                                      |                                                                           |                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |         |      |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                 |  |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|
|  |                                      |                                                                           |                                                    | Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                         | Dokumen | 1    | 1       | Rp150,000,000   | 1       | Rp80,624,800    | 1       | Rp80,923,112    | 1       | Rp82,493,020    | 1       | Rp83,383,945    | 1       | Rp84,359,537    |  |
|  | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |                                                                           |                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |         |      |         | Rp2,295,943,100 |         | Rp1,657,380,900 |         | Rp1,663,513,210 |         | Rp1,695,785,366 |         | Rp1,714,099,848 |         | Rp1,734,154,816 |  |
|  |                                      | Meningkatnya Dividen yang Disetorkan oleh BUMD kepada Pemerintah Provinsi |                                                    |                                                                                                                                 | Persentase peningkatan dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi                                                                           | Persen  | -    | 5       | Rp784,993,200   | 6       | Rp530,608,000   | 7       | Rp532,571,250   | 8       | Rp542,903,132   | 9       | Rp548,766,486   | 10      | Rp555,187,054   |  |
|  |                                      |                                                                           | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                 | Persentase Analisis BUMD dan BLUD yang Ditindaklanjuti                                                                                               | Persen  | 100  | 100     | Rp784,993,200   | 100     | Rp530,608,000   | 100     | Rp532,571,250   | 100     | Rp542,903,132   | 100     | Rp548,766,486   | 100     | Rp555,187,054   |  |
|  |                                      |                                                                           |                                                    | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | Dokumen | 12   | 12      | Rp492,499,800   | 12      | Rp327,185,600   | Rp12    | Rp328,396,187   | 12      | Rp334,767,073   | 12      | Rp338,382,557   | 12      | Rp342,341,633   |  |
|  |                                      |                                                                           |                                                    | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Dokumen | 12   | 12      | Rp292,493,400   | 12      | Rp203,422,400   | Rp12    | Rp204,175,063   | 12      | Rp208,136,059   | 12      | Rp210,383,929   | 12      | Rp212,845,421   |  |
|  |                                      | Terjaganya Kestabilan Inflasi                                             |                                                    |                                                                                                                                 | Tingkat Inflasi                                                                                                                                      | Persen  | 1.95 | 2,5 ± 1 | Rp1,141,315,700 | 2,5 ± 1 | Rp879,035,700   | 2,5 ± 1 | Rp882,288,132   | 2,5 ± 1 | Rp899,404,522   | 2,5 ± 1 | Rp909,118,091   | 2,5 ± 1 | Rp919,754,773   |  |

|  |  |  |                                                       |                                                                                               |                                                                                                                    |         |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
|  |  |  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian     | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                | Persentase Analisis Ekonomi yang Ditindaklanjuti                                                                   | Persen  | 100 | 100 | Rp466,226,400 | 100 | Rp406,338,900 | 100 | Rp407,842,354 | 100 | Rp415,754,496 | 100 | Rp420,244,645 | 100 | Rp425,161,507 |  |
|  |  |  |                                                       | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                           | Dokumen | 12  | 12  | Rp215,599,800 | 12  | Rp202,274,300 | 12  | Rp203,022,715 | 12  | Rp206,961,356 | 12  | Rp209,196,539 | 12  | Rp211,644,138 |  |
|  |  |  |                                                       | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                           | Dokumen | 12  | 12  | Rp250,626,600 | 12  | Rp204,064,600 | 12  | Rp204,819,639 | 12  | Rp208,793,140 | 12  | Rp211,048,106 | 12  | Rp213,517,369 |  |
|  |  |  | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                            | Persentase Analisis Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti                                                          | Persen  | 100 | 100 | Rp675,089,300 | 100 | Rp472,696,800 | 100 | Rp474,445,778 | 100 | Rp483,650,026 | 100 | Rp488,873,447 | 100 | Rp494,593,266 |  |
|  |  |  |                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Dokumen | 12  | 12  | Rp182,472,600 | 12  | Rp149,692,000 | 12  | Rp150,245,860 | 12  | Rp153,160,630 | 12  | Rp154,814,765 | 12  | Rp156,626,098 |  |
|  |  |  |                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup            | Dokumen | 12  | 12  | Rp231,182,500 | 12  | Rp143,752,100 | 12  | Rp144,283,983 | 12  | Rp147,083,092 | 12  | Rp148,671,589 | 12  | Rp150,411,047 |  |
|  |  |  |                                                       | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                               | Dokumen | 12  | 12  | Rp261,434,200 | 12  | Rp179,252,700 | 12  | Rp179,915,935 | 12  | Rp183,406,304 | 12  | Rp185,387,092 | 12  | Rp187,556,121 |  |

|  |                                                           |                                                                                        |                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                        |         |       |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |                                                           | Terwujudnya BLUD dengan nilai IKM sangat baik                                          |                                                    |                                                                                                   | Persentase BLUD dengan Nilai IKM sangat Baik                                                                           | Persen  | -     | 55  | Rp369,634,200   | 60  | Rp247,737,200   | 65  | Rp248,653,828   | 70  | Rp253,477,712   | 75  | Rp256,215,271   | 80  | Rp259,212,990   |  |
|  |                                                           |                                                                                        | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                   | Persentase Analisis BUMD dan BLUD yang Ditindaklanjuti                                                                 | Persen  | 100   | 100 | Rp369,634,200   | 100 | Rp247,737,200   | 100 | Rp248,653,828   | 100 | Rp253,477,712   | 100 | Rp256,215,271   | 100 | Rp259,212,990   |  |
|  |                                                           |                                                                                        |                                                    | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | Dokumen | 12    | 12  | Rp369,634,200   | 12  | Rp247,737,200   | 12  | Rp248,653,828   | 12  | Rp253,477,712   | 12  | Rp256,215,271   | 12  | Rp259,212,990   |  |
|  | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                                                                        |                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                        |         |       |     | Rp4,446,507,500 |     | Rp3,398,124,600 |     | Rp3,410,697,661 |     | Rp3,476,865,189 |     | Rp3,514,415,340 |     | Rp3,555,534,000 |  |
|  |                                                           | Meningkatnya Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan |                                                    |                                                                                                   | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                                           | Nilai   | 93.75 | 90  | Rp4,446,507,500 | 90  | Rp3,398,124,600 | 90  | Rp3,410,697,661 | 90  | Rp3,476,865,189 | 91  | Rp3,514,415,340 | 92  | Rp3,555,534,000 |  |
|  |                                                           |                                                                                        |                                                    |                                                                                                   | Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan                                                                   | Persen  | 73.36 | 30  |                 | 30  |                 | 30  |                 | 30  |                 | 30  |                 | 30  |                 |  |

|  |  |  |                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                  |         |     |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |  |  | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa           | Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah                                       | Persentase proses pengadaan barang dan jasa Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu | Persen  | 100 | 100 | Rp882,719,250   | 100 | Rp676,516,250   | 100 | Rp679,019,360   | 100 | Rp692,192,330   | 100 | Rp699,668,013   | 100 | Rp707,854,129   |  |
|  |  |  |                                                 |                                                                                                            | Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up                                         | Persen  | 100 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 |  |
|  |  |  |                                                 |                                                                                                            | Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                              | Persen  | 100 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 |  |
|  |  |  |                                                 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                             | Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa                                                          | Laporan | 2   | 2   | Rp367,294,500   | 2   | Rp288,661,500   | 2   | Rp289,729,548   | 2   | Rp295,350,301   | 2   | Rp298,540,084   | 2   | Rp302,033,003   |  |
|  |  |  |                                                 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                      | Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa                                                       | Laporan | 12  | 12  | Rp282,749,500   | 12  | Rp212,645,500   | 12  | Rp213,432,288   | 12  | Rp217,572,875   | 12  | Rp219,922,662   | 12  | Rp222,495,757   |  |
|  |  |  |                                                 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                          | Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa                                           | Laporan | 12  | 12  | Rp232,675,250   | 12  | Rp175,209,250   | 12  | Rp175,857,524   | 12  | Rp179,269,154   | 12  | Rp181,205,267   | 12  | Rp183,325,369   |  |
|  |  |  | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang sesuai ketentuan | Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku        | Persen  | 100 | 100 | Rp1,756,639,500 | 100 | Rp1,261,720,225 | 100 | Rp1,266,388,590 | 100 | Rp1,290,956,528 | 100 | Rp1,304,898,859 | 100 | Rp1,320,166,176 |  |
|  |  |  |                                                 |                                                                                                            | Persentase pemenuhan pelayanan dalam memberi informasi seputar pengadaan barang dan jasa                         | Persen  | -   | -   |                 | 90  |                 | 92  |                 | 92  |                 | 94  |                 | 95  |                 |  |

|  |  |  |                                                  |                                                                                                                |                                                                                           |         |       |     |                 |       |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |  |  |                                                  |                                                                                                                | Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan | Rasio   | 0.8   | 0.8 |                 | 0.8   |                 | 0.8 |                 | 1   |                 | 0.8 |                 | 1   |                 |  |
|  |  |  |                                                  | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                 | Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik                             | Laporan | 12    | 12  | Rp801,445,000   | 12    | Rp545,924,750   | 12  | Rp547,944,672   | 12  | Rp558,574,798   | 12  | Rp564,607,406   | 12  | Rp571,213,313   |  |
|  |  |  |                                                  | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa                    | Laporan | 12    | 12  | Rp468,889,000   | 12    | Rp312,011,850   | 12  | Rp313,166,294   | 12  | Rp319,241,720   | 12  | Rp322,689,531   | 12  | Rp326,464,998   |  |
|  |  |  |                                                  | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                | Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa                            | Laporan | 12    | 12  | Rp486,305,500   | 12    | Rp403,783,625   | 12  | Rp405,277,624   | 12  | Rp413,140,010   | 12  | Rp417,601,922   | 12  | Rp422,487,865   |  |
|  |  |  | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Meningkatnya kualitas Kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan kualitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase UKPBJ Provinsi, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3             | Persen  | 54.55 | 85  | Rp1,807,148,750 | 85.71 | Rp1,459,888,125 | 93  | Rp1,465,289,711 | 93  | Rp1,493,716,331 | 100 | Rp1,509,848,468 | 100 | Rp1,527,513,695 |  |
|  |  |  |                                                  |                                                                                                                | Persentase SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang berkompeten                       | Persen  | 90.57 | 85  |                 | 85    |                 | 85  |                 | 87  |                 | 87  |                 | 90  |                 |  |
|  |  |  |                                                  |                                                                                                                | Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa                    | Persen  | 100   | 100 |                 | 100   |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 | 100 |                 |  |

|  |                                         |                                                                                   |                                |                                                                     |                                                                                                      |         |       |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |  |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|
|  |                                         |                                                                                   |                                | Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa                             | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa                                  | Orang   | 40    | 30    | Rp626,194,625   | 40    | Rp444,633,625   | 40    | Rp446,278,769   | 45    | Rp454,936,578   | 45    | Rp459,849,893   | 50    | Rp465,230,136   |  |
|  |                                         |                                                                                   |                                | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                     | Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa                                  | Dokumen | 12    | 12    | Rp466,503,500   | 12    | Rp347,058,500   | 12    | Rp348,342,616   | 12    | Rp355,100,463   | 12    | Rp358,935,548   | 12    | Rp363,135,094   |  |
|  |                                         |                                                                                   |                                | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa | Dokumen | 12    | 12    | Rp714,450,625   | 12    | Rp668,196,000   | 12    | Rp670,668,325   | 12    | Rp683,679,291   | 12    | Rp691,063,027   | 12    | Rp699,148,464   |  |
|  | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |                                                                                   |                                |                                                                     |                                                                                                      |         |       |       | Rp3,606,137,500 |       | Rp2,810,692,450 |       | Rp2,821,092,012 |       | Rp2,875,821,197 |       | Rp2,906,880,066 |       | Rp2,940,890,563 |  |
|  |                                         | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama |                                |                                                                     | Nilai Rata-Rata Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah                                  | Nilai   | -     | 95,90 | Rp3,606,137,500 | 96,10 | Rp2,810,692,450 | 96,30 | Rp2,821,092,012 | 96,60 | Rp2,875,821,197 | 96,90 | Rp2,906,880,066 | 97,10 | Rp2,940,890,563 |  |
|  |                                         |                                                                                   |                                |                                                                     | Nilai LPPD                                                                                           | Nilai   | -     | -     |                 | 3,48  |                 | 3,51  |                 | 3,54  |                 | 3,57  |                 | 3,60  |                 |  |
|  |                                         |                                                                                   |                                |                                                                     | Persentase Realisasi Capaian SPM                                                                     | Persen  | 96,97 | -     |                 | 97    |                 | 97,25 |                 | 97,50 |                 | 97,75 |                 | 98    |                 |  |
|  |                                         |                                                                                   | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Meningkatnya Fasilitasi Bidang Pemerintahan                         | Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pemerintahan              | Persen  | 100   | 100   | Rp1,130,140,800 | 100   | Rp892,720,100   | 100   | Rp896,023,164   | 100   | Rp913,406,013   | 100   | Rp923,270,799   | 100   | Rp934,073,067   |  |

|  |  |  |                            |                                                 |                                                                                           |         |     |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |  |  |                            | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan                      | Dokumen | 1   | 1   | Rp338,743,600   | 1   | Rp230,334,200   | 1   | Rp291,370,798   | 12  | Rp297,023,391   | 12  | Rp300,231,244   | 12  | Rp303,743,949   |  |
|  |  |  |                            | Fasilitasi Penataan Wilayah                     | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah                                                     | Dokumen | 1   | 1   | Rp561,897,200   | 1   | Rp173,596,800   | 1   | Rp421,615,928   | 1   | Rp429,795,277   | 1   | Rp434,437,066   | 1   | Rp439,519,980   |  |
|  |  |  |                            | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                        | Dokumen | 1   | 1   | Rp229,500,000   | 1   | Rp128,779,700   | 1   | Rp183,036,438   | 1   | Rp186,587,345   | 1   | Rp188,602,489   | 1   | Rp190,809,138   |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Otonomi Daerah | Meningkatnya Fasilitasi Bidang Otonomi Daerah   | Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang Otonomi Daerah | Persen  | 100 | 100 | Rp1,163,182,000 | 100 | Rp917,972,350   | 100 | Rp921,368,848   | 100 | Rp939,243,403   | 100 | Rp948,387,231   | 100 | Rp960,495,063   |  |
|  |  |  |                            | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                       | Dokumen | 2   | 2   | Rp340,358,400   | 2   | Rp299,999,800   | 2   | Rp301,109,799   | 2   | Rp306,951,329   | 2   | Rp310,266,404   | 2   | Rp313,896,521   |  |
|  |  |  |                            | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan           | Dokumen | 1   | 1   | Rp414,823,600   | 1   | Rp300,000,000   | 1   | Rp301,110,000   | 1   | Rp306,951,534   | 1   | Rp310,266,611   | 1   | Rp313,896,730   |  |
|  |  |  |                            | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                            | Laporan | 2   | 2   | Rp408,000,000   | 2   | Rp317,972,550   | 2   | Rp319,149,049   | 2   | Rp325,340,540   | 2   | Rp328,854,217   | 2   | Rp332,701,812   |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama      | Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kerja Sama       | Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kerja Sama     | Persen  | 100 | 100 | Rp1,312,814,700 | 100 | Rp1,000,000,000 | 100 | Rp1,003,700,000 | 100 | Rp1,023,171,781 | 100 | Rp1,034,222,035 | 100 | Rp1,046,322,433 |  |

|  |                                         |                                                                                                                                                  |  |                                          |                                                        |         |     |     |                 |     |                 |       |                 |     |                 |       |                 |     |                 |  |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|-------|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |                                         |                                                                                                                                                  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah   | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi   | Dokumen | 54  | 54  | Rp558,761,300   | 54  | Rp325,000,000   | 54    | Rp326,202,500   | 54  | Rp332,530,829   | 54    | Rp336,122,161   | 54  | Rp340,054,791   |  |
|  |                                         |                                                                                                                                                  |  | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi | Dokumen | 40  | 40  | Rp388,293,400   | 40  | Rp400,000,000   | 40    | Rp401,480,000   | 40  | Rp409,268,712   | 40    | Rp413,688,814   | 40  | Rp418,528,973   |  |
|  |                                         |                                                                                                                                                  |  | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama          | Jumlah Kerja Sama yang dievaluasi                      | Laporan | 2   | 2   | Rp365,760,000   | 2   | Rp275,000,000   | 2     | Rp276,017,500   | 2   | Rp281,372,240   | 2     | Rp284,411,060   | 2   | Rp287,738,669   |  |
|  | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |                                                                                                                                                  |  |                                          |                                                        |         |     |     | Rp4,592,475,200 |     | Rp3,678,127,100 |       | Rp3,691,736,169 |     | Rp3,763,355,853 |       | Rp3,804,000,096 |     | Rp3,848,506,897 |  |
|  |                                         | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Layanan Informasi Produk Hukum Daerah, Dan Bantuan Hukum Dalam Koordinasi Dan Fasilitasi Bidang Hukum |  |                                          | Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan         | Persen  | 100 | 100 | Rp4,592,475,200 | 100 | Rp3,678,127,100 | Rp100 | Rp3,691,736,169 | 100 | Rp3,763,355,853 | Rp100 | Rp3,804,000,096 | 100 | Rp3,848,506,897 |  |
|  |                                         |                                                                                                                                                  |  |                                          | Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah   | Persen  | 100 | 100 |                 | 100 | -               | 100   | -               | 100 | -               | 100   | -               | 100 | -               |  |

|  |  |  |                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                  |         |       |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |       |                 |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|--|
|  |  |  |                                                    |                                                                                                                        | Indeks Reformasi Hukum (IRH)                                                                     | Indeks  | 97.46 | 97.56 |                 | 97.66 | -               | 97.75 | -               | 97.85 | -               | 97.95 | -               | 98.05 | -               |  |
|  |  |  |                                                    |                                                                                                                        | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)                                                                  | Poin    | 0     | 55    |                 | 55    | -               | 65    | -               | 65    | -               | 70    | -               | 70    | -               |  |
|  |  |  | Fasilitasi<br>Penyusunan<br>Perundang-<br>Undangan | Tercapainya Kualitas Dan<br>Efektifitas Fasilitasi<br>Penyusunan Perundang-<br>Undangan Provinsi Dan<br>Kabupaten/Kota | Persentase Peraturan Perundang-<br>Undangan Provinsi Yang Sesuai<br>Ketentuan Perundang-Undangan | Persen  | 100   | 100   | Rp2,898,621,200 | 100   | Rp2,364,808,500 | 100   | Rp2,373,558,290 | 100   | Rp2,419,605,323 | 100   | Rp2,445,737,061 | 100   | Rp2,474,352,184 |  |
|  |  |  |                                                    |                                                                                                                        | Persentase Peraturan Perundang-<br>Undangan Kab/Kota Yang Sesuai<br>Ketentuan Perundang-Undangan | Persen  | 100   | 100   | Rp761,383,200   | 100   | Rp653,894,200   | 100   | Rp656,313,609   | 100   | Rp669,046,093   | 100   | Rp676,271,790   | 100   | Rp684,184,170   |  |
|  |  |  |                                                    |                                                                                                                        | Persentase Peraturan Perundang-<br>Undangan Provinsi Yang<br>Terpublikasi                        | Persen  | 100   | 100   | Rp516,658,000   | 100   | Rp257,514,500   | 100   | Rp258,467,304   | 100   | Rp263,481,569   | 100   | Rp266,327,170   | 100   | Rp269,443,198   |  |
|  |  |  |                                                    | Fasilitasi Penyusunan<br>Produk Hukum Pengaturan                                                                       | Jumlah Poduk Hukum Pengaturan<br>Yang Disusun                                                    | Dokumen | 60    | 60    | Rp1,325,393,000 | 60    | Rp1,182,000,100 | 60    | Rp1,186,373,499 | 60    | Rp1,209,389,147 | 60    | Rp1,222,450,550 | 60    | Rp1,236,753,221 |  |
|  |  |  |                                                    | Fasilitasi Penyusunan<br>Produk Hukum Penetapan                                                                        | Jumlah Produk Hukum Penetapan<br>Yang Disusun                                                    | Dokumen | 450   | 500   | Rp295,187,000   | 1000  | Rp271,399,700   | 1000  | Rp272,403,879   | 1000  | Rp277,688,514   | 1000  | Rp280,687,550   | 1000  | Rp283,971,594   |  |
|  |  |  |                                                    | Pendokumentasian Produk<br>Hukum Dan Naskah Hukum<br>Lainnya                                                           | Jumlah Produk Hukum Yang<br>Didokumentasi Dan Dikelola<br>Informasi Hukumnya                     | Dokumen | 500   | 500   | Rp516,658,000   | 500   | Rp257,514,500   | 500   | Rp258,467,304   | 500   | Rp263,481,569   | 500   | Rp266,327,170   | 500   | Rp269,443,198   |  |

|  |                                                       |                                                                       |                          |                                                                            |                                                                                                  |         |     |     |                 |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
|--|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--|
|  |                                                       |                                                                       |                          | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                        | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Dan Dievaluasi                              | Dokumen | 125 | 125 | Rp761,383,200   | 125 | Rp653,894,200     | 135 | Rp656,313,609     | 135 | Rp669,046,093     | 135 | Rp676,271,790     | 135 | Rp684,184,170     |  |
|  |                                                       |                                                                       | Fasilitasi Bantuan Hukum | Terselesainya Fasilitasi Masalah Hukum (Litigasi) Dan (Non Litigasi & HAM) | Persentase Terselesainya Bantuan/Layanan Hukum Litigasi Di Pengadilan                            | Persen  | 100 | 100 | Rp1,693,854,000 | 100 | Rp1,313,318,600   | 100 | Rp1,318,177,879   | 100 | Rp1,343,750,530   | 100 | Rp1,358,263,035   | 100 | Rp1,374,154,713   |  |
|  |                                                       |                                                                       |                          |                                                                            | Persentase Terselesainya Bantuan/Layanan Hukum Non Litigasi Di Luar Pengadilan & PS HAM Kab/Kota | Persen  | 100 | 100 |                 | 100 | Rp256,068,000     | 100 | Rp257,015,452     | 100 | Rp262,001,551     | 100 | Rp264,831,168     | 100 | Rp267,929,693     |  |
|  |                                                       |                                                                       |                          | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                      | Jumlah Masalah Hukum Yang Diselesaikan                                                           | Kasus   | 6   | 12  | Rp1,363,590,000 | 12  | Rp1,057,250,600   | 12  | Rp1,061,162,427   | 12  | Rp1,081,748,978   | 12  | Rp1,093,431,867   | 12  | Rp1,106,225,020   |  |
|  |                                                       |                                                                       |                          | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi Dan HAM                       | Jumlah Masalah Non Litigasi Dan HAM Yang Diselesaikan                                            | Kasus   | 12  | 12  | Rp330,264,000   | 12  | Rp256,068,000     | 12  | Rp257,015,452     | 12  | Rp262,001,551     | 12  | Rp264,831,168     | 12  | Rp267,929,693     |  |
|  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                       |                          |                                                                            |                                                                                                  |         |     |     |                 |     | Rp200,302,548,403 |     | Rp201,043,667,831 |     | Rp204,943,914,986 |     | Rp207,157,309,271 |     | Rp209,581,049,787 |  |
|  |                                                       | Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah |                          |                                                                            | Persentase Kegiatan Tepat Waktu                                                                  | Persen  | -   | -   |                 | 100 | Rp200,302,548,403 | 100 | Rp201,043,667,831 | 100 | Rp204,943,914,986 | 100 | Rp207,157,309,271 | 100 | Rp209,581,049,787 |  |
|  |                                                       |                                                                       |                          |                                                                            | Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu                                                     | Persen  | -   | -   |                 | 100 |                   | 100 |                   | 100 |                   | 100 |                   | 100 |                   |  |

|  |  |  |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |         |     |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                   |                 |                   |                 |                   |                 |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
|  |  |  |                                                                  |                                                                                                   | Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal                                                                                                                      | Nilai   | -   | -                |                 | 100              |                 | 100              |                 | 100               |                 | 100               |                 | 100               |                 |  |
|  |  |  |                                                                  |                                                                                                   | Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat                                                                                                      | Persen  | -   | -                |                 | 100              |                 | 100              |                 | 100               |                 | 100               |                 | 100               |                 |  |
|  |  |  |                                                                  |                                                                                                   | Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat                                                                                                       | Persen  | -   | -                |                 | 100              |                 | 100              |                 | 100               |                 | 100               |                 | 100               |                 |  |
|  |  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik | Persen                                                                                                                                                                 | 100     | 100 | Rp9,361,391,700  | 100             | Rp9,739,674,600  | 100             | Rp9,775,711,395  | 100             | Rp9,965,360,195   | 100             | Rp10,072,986,087  | 100             | Rp10,190,840,024  |                 |  |
|  |  |  |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 12  | 12               | Rp1,678,522,000 | 12               | Rp1,564,377,600 | 12               | Rp1,570,165,797 | 12                | Rp1,600,627,014 | 12                | Rp1,617,913,785 | 12                | Rp1,636,843,377 |  |
|  |  |  |                                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen | 6   | 6                | Rp1,181,676,700 | 6                | Rp1,252,116,800 | 6                | Rp1,256,749,631 | 6                 | Rp1,281,130,573 | 6                 | Rp1,294,966,785 | 6                 | Rp1,310,117,897 |  |
|  |  |  |                                                                  | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                            | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | Data    | -   | -                | -               | 3                | Rp532,560,200   | 3                | Rp534,530,673   | 3                 | Rp544,900,568   | 3                 | Rp550,785,494   | 3                 | Rp557,229,684   |  |
|  |  |  |                                                                  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan | 1   | 2                | Rp6,501,193,000 | 2                | Rp6,390,620,000 | 2                | Rp6,414,265,294 | 2                 | Rp6,538,702,041 | 2                 | Rp6,609,320,023 | 2                 | Rp6,686,649,067 |  |
|  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik                          | Persen                                                                                                                                                                 | 100     | 100 | Rp87,054,301,700 | 100             | Rp98,918,722,500 | 100             | Rp99,284,721,773 | 100             | Rp101,210,845,376 | 100             | Rp102,303,922,506 | Rp100           | Rp103,500,878,399 |                 |  |

|  |  |  |                                    |                                                                               |                                                                                                                                                  |         |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
|  |  |  |                                    | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               | Dokumen | 12  | 12  | Rp2,107,814,800  | 12  | Rp1,196,217,600  | 12  | Rp1,200,643,605  | 12  | Rp1,223,936,091  | 12  | Rp1,237,154,601  | 100 | Rp1,251,629,310  |  |
|  |  |  |                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12  | 12  | Rp451,342,200    | 12  | Rp649,352,300    | 12  | Rp651,754,904    | 12  | Rp664,398,949    | 12  | Rp671,574,457    | 12  | Rp679,431,878    |  |
|  |  |  |                                    | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                               | Dokumen | 4   | 4   | Rp345,441,400    | 4   | Rp324,152,900    | 4   | Rp325,352,266    | 4   | Rp331,664,100    | 4   | Rp335,246,072    | 4   | Rp339,168,451    |  |
|  |  |  |                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Laporan | 12  | 12  | Rp115,689,200    | 12  | Rp109,884,100    | 12  | Rp110,290,671    | 12  | Rp112,430,310    | 12  | Rp113,644,558    | 12  | Rp114,974,199    |  |
|  |  |  |                                    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              | Dokumen | 4   | 4   | Rp739,066,200    | 4   | Rp849,925,800    | 4   | Rp853,070,525    | 4   | Rp869,620,094    | 4   | Rp879,011,991    | 4   | Rp889,296,431    |  |
|  |  |  |                                    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                   | Dokumen | 4   | 4   | Rp371,547,900    | 4   | Rp427,279,800    | 4   | Rp428,860,735    | 4   | Rp437,180,634    | 4   | Rp441,902,184    | 4   | Rp447,072,440    |  |
|  |  |  |                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | Bulan   | 12  | 12  | Rp82,923,400,000 | 12  | Rp95,361,910,000 | 12  | Rp95,714,749,067 | 12  | Rp97,571,615,199 | 12  | Rp98,625,388,643 | 12  | Rp99,779,305,690 |  |
|  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik          | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik                                                                                          | Persen  | 100 | 100 | Rp20,633,138,025 | 100 | Rp10,363,825,225 | 100 | Rp10,402,171,378 | 100 | Rp10,603,973,503 | 100 | Rp10,718,496,417 | 100 | Rp10,843,902,825 |  |
|  |  |  |                                    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                   | Paket   | 344 | 344 | Rp1,864,983,000  | 344 | Rp2,010,306,100  | 344 | Rp2,017,744,233  | 344 | Rp2,056,888,471  | 344 | Rp2,079,102,866  | 344 | Rp2,103,428,370  |  |

|  |  |  |                                           |                                                                             |                                                                                       |         |     |     |                  |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |  |  |                                           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | Paket   | 172 | 172 | Rp804,205,800    | 172 | Rp508,734,400   | 172 | Rp510,616,717   | 172 | Rp520,522,682   | 172 | Rp526,144,327   | 172 | Rp532,300,215   |  |
|  |  |  |                                           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan | 12  | 12  | Rp14,483,784,200 | 12  | Rp6,037,668,900 | 12  | Rp6,060,008,275 | 12  | Rp6,177,572,435 | 12  | Rp6,244,290,218 | 12  | Rp6,317,348,413 |  |
|  |  |  |                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | Paket   | 20  | 20  | Rp1,681,540,000  | 20  | Rp760,778,500   | 20  | Rp763,593,380   | 20  | Rp778,407,092   | 20  | Rp786,813,889   | 20  | Rp796,019,611   |  |
|  |  |  |                                           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | 12  | 12  | Rp648,065,525    | 12  | Rp592,755,725   | 12  | Rp594,948,921   | 12  | Rp606,490,930   | 12  | Rp613,041,032   | 12  | Rp620,213,612   |  |
|  |  |  |                                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | Paket   | 28  | 28  | Rp382,944,500    | 28  | Rp176,497,600   | 28  | Rp177,150,641   | 28  | Rp180,587,364   | 28  | Rp182,537,707   | 28  | Rp184,673,398   |  |
|  |  |  |                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | Dokumen | 12  | 12  | Rp665,000,000    | 12  | Rp225,000,000   | 12  | Rp225,832,500   | 12  | Rp230,213,651   | 12  | Rp232,699,958   | 12  | Rp235,422,547   |  |
|  |  |  |                                           | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1   | 1   | Rp102,615,000    | 1   | Rp52,084,000    | 1   | Rp52,276,711    | 1   | Rp53,290,879    | 1   | Rp53,866,420    | 1   | Rp54,496,658    |  |
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik                        | Persen  | 100 | 100 | Rp1,814,617,400  | 100 | Rp1,214,342,600 | 100 | Rp1,218,835,668 | 100 | Rp1,242,481,080 | 100 | Rp1,255,899,875 | 100 | Rp1,270,593,904 |  |
|  |  |  |                                           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya                      | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                             | Paket   | 9   | 9   | Rp622,000,000    | 9   | Rp266,500,000   | 9   | Rp267,486,050   | 9   | Rp272,675,279   | 9   | Rp275,620,172   | 9   | Rp278,844,928   |  |
|  |  |  |                                           | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                  | Orang   | 46  | 46  | Rp206,412,600    | 46  | Rp178,746,000   | 46  | Rp179,407,360   | 46  | Rp182,887,863   | 46  | Rp184,863,052   | 46  | Rp187,025,950   |  |

|  |  |  |                                                                             |                                                                                                      |                                                                                        |         |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
|  |  |  |                                                                             | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   | 46  | 46  | Rp628,164,800    | 46  | Rp375,308,600    | 46  | Rp376,697,242    | 46  | Rp384,005,168    | 46  | Rp388,152,424    | 46  | Rp392,693,807    |  |
|  |  |  |                                                                             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Dokumen | 17  | 17  | Rp305,418,800    | 17  | Rp335,908,000    | 17  | Rp337,150,860    | 17  | Rp343,691,586    | 17  | Rp347,403,455    | 17  | Rp351,468,076    |  |
|  |  |  |                                                                             | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | Orang   | -   | 2   | Rp52,621,200     | 2   | Rp57,880,000     | 2   | Rp58,094,156     | 2   | Rp59,221,183     | 2   | Rp59,860,771     | 2   | Rp60,561,142     |  |
|  |  |  | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terselenggaranya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    | Bulan   | 12  | 12  | Rp9,318,779,045  | 12  | Rp10,716,595,898 | 12  | 10,756,247,303   | 12  | Rp10,964,918,500 | 12  | 11,083,339,620   | 12  | Rp11,213,014,694 |  |
|  |  |  |                                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    | Bulan   | 12  | 12  | Rp9,318,779,045  | 12  | Rp10,716,595,898 | 12  | Rp10,756,247,303 | 12  | Rp10,964,918,500 | 12  | Rp11,083,339,620 | 12  | Rp11,213,014,694 |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik              | Persen  | 100 | 100 | Rp26,091,070,184 | 100 | Rp7,705,360,476  | 100 | Rp7,733,870,310  | 100 | Rp7,883,907,394  | 100 | Rp7,969,053,594  | 100 | Rp8,062,291,521  |  |
|  |  |  |                                                                             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Laporan | 12  | 12  | Rp584,956,000    | 12  | Rp632,056,000    | 12  | Rp634,394,607    | 12  | Rp646,701,863    | 12  | Rp653,686,243    | 12  | Rp661,334,372    |  |
|  |  |  |                                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12  | 12  | Rp8,237,467,784  | 12  | Rp1,716,104,976  | 12  | Rp1,722,454,564  | 12  | Rp1,755,870,183  | 12  | Rp1,774,833,581  | 12  | Rp1,795,599,134  |  |
|  |  |  |                                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 12  | 12  | Rp14,409,646,400 | 12  | Rp4,072,699,500  | 12  | Rp4,087,768,488  | 12  | Rp4,167,071,197  | 12  | Rp4,212,075,566  | 12  | Rp4,261,356,850  |  |

|  |  |  |                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                          |        |        |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--|
|  |  |  |                                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                                           | Paket  | 344    | 344    | Rp2,859,000,000  | 344    | Rp1,284,500,000  | 344    | Rp1,289,252,650  | 344    | Rp1,314,264,151  | 344    | Rp1,328,458,204  | 344    | Rp1,344,001,165  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik         | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik               | Persen | 100    | 100    | Rp27,375,126,200 | 100    | Rp22,364,930,800 | 100    | Rp22,447,681,044 | 100    | Rp22,883,166,056 | 100    | Rp23,130,304,250 | 100    | Rp23,400,928,809 |  |
|  |  |  |                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | Unit   | 27     | 28     | Rp13,553,833,700 | 28     | Rp11,987,090,300 | 28     | Rp12,031,442,534 | 28     | Rp12,264,852,519 | 28     | Rp12,397,312,926 | 28     | Rp12,542,361,488 |  |
|  |  |  |                                                                       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | Unit   | 33     | 51     | Rp55,930,000     | 51     | Rp55,280,000     | 51     | Rp55,484,536     | 51     | Rp56,560,936     | 51     | Rp57,171,794     | 51     | Rp57,840,704     |  |
|  |  |  |                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | 21     | 23     | Rp2,325,790,000  | 23     | Rp1,015,320,000  | 23     | Rp1,019,076,684  | 23     | Rp1,038,846,772  | 23     | Rp1,050,066,317  | 23     | Rp1,062,352,093  |  |
|  |  |  |                                                                       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | Unit   | 190    | 200    | Rp6,761,129,000  | 200    | Rp4,360,964,000  | 200    | Rp4,377,099,567  | 200    | Rp4,462,015,298  | 200    | Rp4,510,205,064  | 200    | Rp4,562,974,463  |  |
|  |  |  |                                                                       | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                | Unit   | 15,000 | 15,000 | Rp3,714,427,000  | 15,000 | Rp4,085,868,000  | 15,000 | Rp4,100,985,712  | 15,000 | Rp4,180,544,834  | 15,000 | Rp4,225,694,719  | 15,000 | Rp4,275,135,347  |  |
|  |  |  |                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | Unit   | 28     | 28     | Rp542,978,000    | 28     | Rp397,268,000    | 28     | Rp398,737,892    | 28     | Rp406,473,407    | 28     | Rp410,863,319    | 28     | Rp415,670,420    |  |
|  |  |  |                                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                 | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      | Ha     | 10     | 10     | Rp421,038,500    | 10     | Rp463,140,500    | 10     | Rp464,854,120    | 10     | Rp473,872,290    | 10     | Rp478,990,111    | 10     | Rp484,594,295    |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                        |        |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
|  |  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                               | Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik           | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik                            |        |     |     | Rp154,619,500    |     | Rp185,543,400    |     | Rp186,229,911    |     | Rp189,842,771    |     | Rp191,893,073    |     | Rp194,138,222    |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                        | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik                            | Persen | 100 | 100 | Rp154,619,500    | 100 | Rp185,543,400    |     | Rp186,229,911    |     | Rp189,842,771    |     | Rp191,893,073    |     | Rp194,138,222    |  |
|  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | Meningkatnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik                  | Persen | 100 | 100 | Rp43,858,693,600 | 100 | Rp29,620,115,500 | 100 | Rp29,729,709,927 | 100 | Rp30,306,466,300 | 100 | Rp30,633,776,136 | 100 | Rp30,992,191,317 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit   | 293 | 262 | Rp8,023,406,000  | 262 | Rp9,193,744,000  | 262 | Rp9,227,760,853  | 262 | Rp9,406,779,413  | 262 | Rp9,508,372,631  | 262 | Rp9,619,620,591  |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | Unit   | 90  | 57  | Rp32,428,507,000 | 57  | Rp16,680,920,500 | 57  | Rp16,742,639,906 | 57  | Rp17,067,447,120 | 57  | Rp17,251,775,549 | 57  | Rp17,453,621,323 |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                      | Pengadaan Mebel                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Paket  | 85  | 14  | Rp3,406,780,600  | 14  | Rp3,745,451,000  | 14  | Rp3,759,309,169  | 14  | Rp3,832,239,767  | 14  | Rp3,873,627,956  | 14  | Rp3,918,949,403  |  |
|  |  |  | Meningkatnya tata kelola layanan keprotokolan dan penyusunan materi komunikasi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah |                                                                                                    | Persentase pemenuhan layanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu | Persen | -   | -   | Rp12,305,915,804 | 100 | Rp18,946,874,808 | 100 | Rp19,016,978,245 | 100 | Rp19,385,907,623 | 100 | Rp19,595,275,426 | 100 | Rp19,824,540,145 |  |
|  |  |  | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                                                            | Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan                                          | Persentase Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | Persen | 100 | 100 | Rp10,307,718,004 | 100 | Rp8,058,437,604  | 100 | Rp8,088,253,823  | 100 | Rp8,245,165,947  | 100 | Rp8,334,213,740  | 100 | Rp8,431,724,039  |  |

|  |  |  |                         |                                                                 |                                                                                      |         |     |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|
|  |  |  |                         | Penyiapan Materi Pimpinan                                       | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                        | Dokumen | 12  | 12  | Rp318,710,000   | 12  | Rp230,000,000   | 12  | Rp230,851,000   | 12  | Rp235,329,509   | 12  | Rp237,871,068   | 12  | Rp240,654,160   |  |
|  |  |  |                         | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                  | Laporan | 12  | 12  | Rp2,167,545,204 | 12  | Rp1,638,108,604 | 12  | Rp1,644,169,606 | 12  | Rp1,676,066,496 | 12  | Rp1,694,168,015 | 12  | Rp1,713,999,779 |  |
|  |  |  |                         | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                      | Laporan | 12  | 12  | Rp7,821,462,800 | 12  | Rp6,190,329,000 | 12  | Rp6,213,233,217 | 12  | Rp6,333,769,942 | 12  | Rp6,402,174,657 | 12  | Rp6,477,080,101 |  |
|  |  |  | Fasilitasi Keprotokolan | Tercapainya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan                    | Persentase Tercapainya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan                              | Persen  | 100 | 100 | Rp1,998,197,800 | 100 | Rp1,414,999,800 | 100 | Rp1,420,235,299 | 100 | Rp1,447,787,864 | 100 | Rp1,463,423,973 | 100 | Rp1,480,546,033 |  |
|  |  |  |                         | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | Laporan | 12  | 12  | Rp708,094,000   | 12  | Rp515,000,000   | 12  | Rp516,905,500   | 12  | Rp526,933,467   | 12  | Rp532,624,348   | 12  | Rp538,856,053   |  |
|  |  |  |                         | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Laporan | 12  | 12  | Rp601,826,000   | 12  | Rp449,999,800   | 12  | Rp451,664,799   | 12  | Rp460,427,096   | 12  | Rp465,399,709   | 12  | Rp470,844,886   |  |
|  |  |  |                         | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     | Laporan | 12  | 12  | Rp688,277,800   | 12  | Rp450,000,000   | 12  | Rp451,665,000   | 12  | Rp460,427,301   | 12  | Rp465,399,916   | 12  | Rp470,845,095   |  |

#### 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan output dari pelaksanaan program dan subkegiatan strategis. IKK digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, serta dukungan teknis kepada kepala daerah. Fokus pengukuran IKK meliputi peningkatan ketepatan waktu penyampaian dokumen, kualitas pelayanan internal, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis daerah. Pencapaian target IKK menjadi tolok ukur utama dalam memastikan ketercapaian sasaran pembangunan yang akuntabel dan terukur.

**Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

| NO  | PROGRAM PRIORITAS                                         | OUTCOME                                                              | KEGIATAN/SUBKEGIATAN                              | KET. |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| (1) | (2)                                                       | (3)                                                                  | (4)                                               | (5)  |
|     | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                            |                                                                      |                                                   |      |
|     | Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa | Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa             |      |
|     |                                                           |                                                                      | Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa    |      |
|     |                                                           |                                                                      | Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa             |      |
|     |                                                           |                                                                      | Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa |      |
|     |                                                           | Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Prov.Kalsel dan kualitas SDM | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  |      |

|  |                                     |                                                                      |                                                                                                          |  |
|--|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                     | Pengadaan Barang dan Jasa                                            |                                                                                                          |  |
|  |                                     |                                                                      | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                          |  |
|  |                                     |                                                                      | Pembinaan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa                                                        |  |
|  |                                     | Meningkatnya kualitas layanan konsultasi pendampingan dan bimtek PBJ | Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa                                       |  |
|  |                                     | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                      | Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang & jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan |  |
|  |                                     |                                                                      | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                           |  |
|  |                                     |                                                                      | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                  |  |
|  |                                     |                                                                      | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                          |  |
|  |                                     |                                                                      |                                                                                                          |  |
|  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT           |                                                                      |                                                                                                          |  |
|  | <b>Program Kesejahteraan Rakyat</b> | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat   | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                    |  |
|  |                                     |                                                                      | Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual                                                               |  |
|  |                                     |                                                                      | Fasilitasi kelembagaan bina spiritual                                                                    |  |
|  |                                     |                                                                      | Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar                                             |  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Fasilitasi,koordinasi,sinkronisasi,evaluasi,dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                         |  |
|  |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  | Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                             |  |

**4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan**

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD**

| NO  | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN | BASELINE | TARGET TAHUN |      |      |       |       |       | KET  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------|------|-------|-------|-------|------|
|     |                                                                                                                                                               |        | 2024     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (1) | (2)                                                                                                                                                           | (3)    |          | (4)          | (5)  | (6)  | (7)   | (8)   | (9)   | (10) |
|     | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                |        |          |              |      |      |       |       |       |      |
|     | Predikat Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                                                                                              | Nilai  |          | 90           | 90   | 90   | 90    | 90    | 90    |      |
|     | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                          | Persen |          | 30           | 30   | 30   | 30    | 30    | 30    |      |
|     | Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)                                                                                                                        | Nilai  |          | 95           | 95   | 95   | 95    | 95    | 95    |      |
|     |                                                                                                                                                               |        |          |              |      |      |       |       |       |      |
|     | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                     |        |          |              |      |      |       |       |       |      |
|     | Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama                                                                                                                  | Poin   |          | 74.3         | 74.7 | 75.1 | 75.51 | 75.91 | 76.32 |      |
|     | Persentase peningkatan pengumpulan zakat, nfak, dan sadakah (ZIS)                                                                                             | Persen |          | 32           | 33   | 34   | 35    | 37    | 38    |      |
|     | Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti | Persen |          | -            | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   |      |
|     |                                                                                                                                                               |        |          |              |      |      |       |       |       |      |
|     | BIRO HUKUM                                                                                                                                                    |        |          |              |      |      |       |       |       |      |
|     | Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan                                                                                                                | Persen | 100      | 100          | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   |      |
|     | Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah                                                                                                          | Persen | 100      | 100          | 100  | 100  | 100   | 100   | 100   |      |

|  |                                 |      |     |   |    |    |    |    |    |                                                          |
|--|---------------------------------|------|-----|---|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------------|
|  | Indeks Reformasi Hukum (IRH)    | Poin | N/A | 0 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | untuk IRH Tahun 2025<br>belum keluar hasil dari<br>Pusat |
|  | Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) | Poin | N/A | 0 | 55 | 65 | 65 | 70 | 70 | untuk IKKTahun 2025<br>belum keluar hasil dari<br>Pusat  |

**4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD**

| NO  | INDIKATOR                                            | SATUAN | BASELINE | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|-----|------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |                                                      |        | 2024     | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (1) | (2)                                                  | (3)    |          | (4)          | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |
|     | BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA                       |        |          |              |      |      |      |      |      |      |
|     | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan | Persen | 73.36    | 30           | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |      |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan acuan dan panduan bagi seluruh biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru,     Maret 2025

Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan,

  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd  
Pemula Utama Madya  
NIP. 19671030 199412 1 003